

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 288, 2020

KEMENDAGRI. PP Nomor 13 Tahun 2019. Laporan dan Evaluasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat fungsional pada inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
- 8. Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- 9. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya.
- 10. Tim Nasional adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.
- 11. Tim Daerah Provinsi adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam

melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Muatan

- (1) LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
 - a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.
- (3) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja makro;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
- (4) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (5) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan

- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (6) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.
- (7) Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.
- (8) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 3

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
- b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
- c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
- d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
- f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.

- (1) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD.
- (2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun.
- (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun.
- (4) Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas:
 - a. inspektorat daerah;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - d. biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten/kota; dan
 - e. perangkat daerah lainnya.

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

(2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyiapan data; dan
 - b. kompilasi data.
- (2) Penyiapan dan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di provinsi dan unit kerja perangkat gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Pasal 7

Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh tim penyusun LPPD.

- (1) Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
- Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan (2)pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah daerah menugaskan perangkat terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.

- (1) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
- (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
- (3) Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika:
 - a. data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan
 - c. metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.
- (4) Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

Pasal 10

LPPD disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penyampaian

Pasal 11

(1) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

- (2) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
- (5) Dalam hal penyampaian LPPD dilakukan secara daring, waktu penyampaian LPPD yaitu terhitung sejak tanggal dokumen diunggah dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

- (1) Kepala daerah yang terlambat menyampaikan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dinyatakan tidak menyampaikan LPPD.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Pasal 13

Menteri meneruskan informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Muatan

- (1) Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemerintah daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 - 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 - 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 - 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 - 2. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.

- (4) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 15

Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik.

Pasal 17

LKPJ disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penyampaian

Pasal 18

(1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang

- dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

- (1) Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (2) Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan perwakilan rakyat daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- (4) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (5) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

- (1) Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Muatan

Pasal 21

RLPPD memuat:

- a. capaian kinerja makro;
- b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya;
- d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. inovasi daerah.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 22

- (1) Penyusunan RLPPD dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) RLPPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penyampaian

Pasal 23

- (1) RLPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.
- (2) RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui:
 - a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online;
 - b. papan pengumuman yang mudah diakses publik;dan
 - c. website resmi pemerintah daerah.
- (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

(1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara

- keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masingmasing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama.
- (3) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua Sasaran Penilaian

- (1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan menilai:
 - a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan
 - b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.
- (4) Penilaian capaian IKK sebagaimana dimaksud pada ayat(3), dilakukan berdasarkan:
 - a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan

- b. bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan.
- (5) IKK dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dirubah, ditambah dan/atau disempurnakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian serta mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Uraian indikator dan bobot nilai untuk indikator kinerja makro dan IKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 26

- (1) EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.
- (2) EPPD provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) EPPD kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi berdasarkan penugasan dari gubernur.
- (4) Pelaksanaan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Tim Daerah Provinsi.

- (1) Tim Nasional EPPD melakukan EPPD provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun.
- (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terdiri atas:
 - a. Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - c. Kementerian Keuangan;

- d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- f. Badan Pusat Statistik.
- (3) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh badan hukum independen.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Tim Nasional dalam melakukan EPPD provinsi melaksanakan:
 - pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
 - validasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh tim daerah;
 - c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah provinsi kepada Menteri; dan
 - d. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah provinsi yang di evaluasi sebagai umpan balik.
- (6) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Nasional dilaporkan kepada Menteri berupa laporan hasil evaluasi masing-masing pemerintah daerah provinsi.
- (7) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (1) Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional yang terdiri atas:
 - a. peringkat kinerja provinsi;
 - b. peringkat kinerja kabupaten; dan
 - c. peringkat kinerja kota.

- (2) Tim Nasional dalam melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. menghitung nilai kinerja provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator dan bobot yang telah ditentukan; dan
 - b. melakukan pemeringkatan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan skor dan status kinerja pemerintah daerah.
- (3) Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional yang telah ditentukan oleh Tim Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Metode penghitungan nilai kinerja dan penentuan peringkat kinerja provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Tim Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), terdiri atas:
 - a. gubernur selaku wakil pemerintah pusat selaku penanggung jawab;
 - b. sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - c. inspektur daerah selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - d. kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi selaku anggota;
 - e. kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan selaku anggota;
 - f. kepala dinas pengelolaan keuangan daerah selaku anggota;
 - g. kepala badan pusat statistik provinsi selaku anggota; dan
 - h. pejabat daerah lainnya.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Daerah Provinsi beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Tim Daerah Provinsi dalam melakukan EPPD kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
 - c. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas tim daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat tim daerah EPPD yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.
- (5) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah Provinsi dilaporkan kepada gubernur, berupa laporan hasil evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota.
- (6) Laporan hasil evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh gubernur kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.
- (3) Penyampaian hasil EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.

Hasil EPPD digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan:

- a. pertimbangan pemberian penghargaan;
- b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
- c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

BAB VI JENIS PENGHARGAAN

- (1) Presiden memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi berdasarkan hasil EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atas usulan Menteri.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan aspek ketaatan hukum.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanda kehormatan samkaryanugraha berupa parasamya purnakarya nugraha kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan satyalancana karya bhakti praja nugraha kepada kepala daerah.
- (4) Pemberian penghargaan kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dan diberikan pada rangkaian peringatan hari otonomi daerah.
- (6) Penghargaan kepada daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam

pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 33

Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan penghargaan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi DKI Jakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan daerah tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada pada tanggal 06 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal **27 Maret 2020**

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020.

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT SISTEMATIKA

BAB 1

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. PROVINSI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
 - 1.1.1 Penjelasan Utmun

Bagian ini memuat informasi tentang profit daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsl);
- e. jundah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- f. realisasi angggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang melipuli beberapa halsebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- visi dan misi kepala daerah;
- e. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan

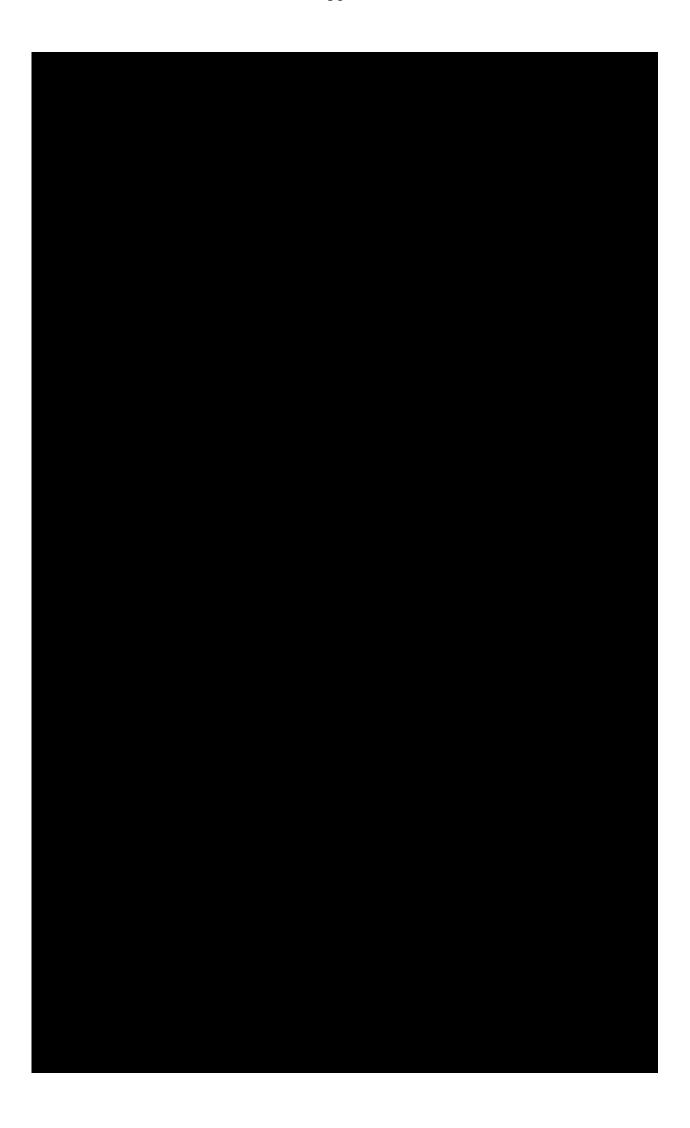
















BAB II

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAEPAH KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelusan Umum

Ragian Ini memuat Informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi teberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-mdang pembentukai, daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kecamatan dan desa/kebushan (untuk kabupaten/kota);
- jundah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- realisasi anggaran pendapatan dan belanja daeran.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian ini mentuat informasi yang meliputi peberapa balsebagai berikut:

- permasalahan strategis pemerimah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- prigram pembangiman daerah berdasarkan cokumen perencanaan jangka mencuga'i; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan alandar pelayanan minimat, dasar penerapan atandar pelayanan minimal, kebijakan muum daerah dalam rencana penerapan dan penerapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pendangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1





















Capaiatr kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabél sebagai berikut:

2.1.1 Belaksonsan Drusan Wojib yang Berkaitan dengan Belayanar, Dasar

NO	ORUSAN PRMERINTA HAN	DEGANSASI PERANGKAT DZERAH FELAKSASA	KAN	PROSYRES	TARGET	REALISESE	L'EZMASA LAHAN	OPAYA MENGATAS PERMASALAHAN	EXECUTABLES DPRD
-	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan 2	J		*******		1	2	1 2 Dat
2			<i>J</i>				- 1533 July 1997	2 Det	1 2 Dst

Ketelangan:

Tangat ebalah hasil yang dicepai pada tingkat outcome yang soyas terlihat setelah output dicepai (immediata outcome). Contoin pembangunan alam, outputnya adalam panjang jalan ya terbangun, outcomenya adalah peningkatan sosial dan/atau okosomi menyarakat. Bedangkan immediata automenya antara lain adalah waktu tempuh atau bizya/ongkas angkin pada ruas jalan ya dibangun zersebut.

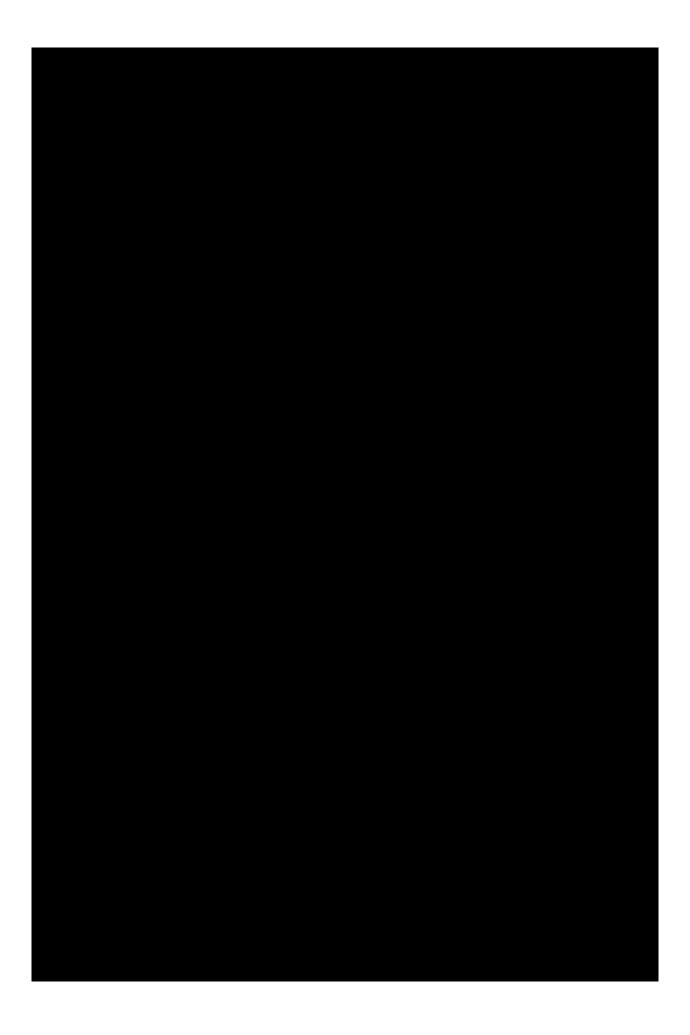
3.1.2 Felaksansan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO.	DRUSAN PRMEDDITA HAN	ORGANISASI PERANCIKAT DAERAH PISLAKSANA	KAR	USAIAN PROGYKRO	TARGET	RISALIBASI	HSRMASA LAHAN	UPAYA MEKGATASI PERMASALAHAN	CINCUT DEROMENTASI DERO
103	Tenaga Korj.	Dinas Tenaga Kenja	sond son	amudanen:	(Annual II		1 2 Del	0	1
2	22			/			1 2 Dsr	2	1

3.1.3 Felaksansan Drusan Pilihan

NO.	DRUSAN PRMERIETA HAN	ORGANISASI PERANCIKAT DAERAH PISLAKSANA	KEBDA	USAIAS PROG/KRG	TARGET	KIALISASI	PERMANA LAITAN	UPAYA MEKGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENTASI DPED
E	Kelantan Dan pe. Ikanan	I. Dinas Kelau an dar. penkanan 2						1 2 Det	1 2 Dat
2	conscient	nonin no		/		410.00.00	1	1	1





BAB IV SISTEMATIKA RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RLPPD merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan			
	Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Per kapita			
6	Ketimpangan Pendapatan			

- 2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sosial, ketentraman dan ketertiban)
- 3. Hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya
- 4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah
- 5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan
- 6. Inovasi Daerah

BAB V. INDIRATOR KINERJA UNTUK EVALUASI FENYELENGGARAAN PEMERINYAHAN DABRAH.

Kwatiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1990) dikakukan untuk meniki kinega keberhastan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasdan pekiksuraan masing-masing urusan pemerintahan yang nerpali kewasangan daerah EPPO terbiri atas 2 úlma) enis pada sai at tara laine

Kvaluasi Kinoga Makec

Kadassi Kinera Makro dilakukan untuk mendapulkan gambaran leberhasilan pemelenggasan pemetintahan daerah secara urtum dengan merikai capakan kinerja masing mesing indikator kinerja makro yang sama untuk provinsi, kabupatan dae kota, sebagai berikut.

90	Indikator Kinerja Makro	Fotos Indicator
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka kemiskinan	20%
3	Angka penganggu an	15%
4	Pertunchalian ekorona	1098/
5	Pendapatanper kapita	13%
6	Ketimpangan Pendapatan (Umi Rotic)	20%

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Eadrosi Kineja Peryek ggarson Umsen Pemerin alam Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambara i Jani keberbasikan daerah dalam mengatur dan mengunia urusan yang menjadi keschangan daerah. Raduani Kineja Fenyelengguraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggurasaan halikator Kineja Kumi (KK) yang disusum berbasarkan pemerintah daerah produsi. Babupaten lam Kota yang diatur daeam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut

a temperati

1) - Oroman Pemerintahan Wajib Berkatan Pelayanan Casar

n) Pendidikan (Habot Umasan : 686)

140	ECK Output	IKK Outcome	Rumus	Babot
L	dundel Beketett berijnter Tingket Abes/SUFA Neger terskreddasi dundel pesente del k sekolet neutrigalt ates yong neutrins perkingkapar, daser peserta didik dar. Pemerintah Doerah	vanga negarar uara 16- 18 tahun yang berpartaipasi dalam	Annulab anak usia to cus in totas] sampai congan 18 (delajum belas) tahun yang sudah tamat atau sebang belajur di sekub h inchoogah atas	i KPba

	Ikk Ontput	IKK Octoone	Rumus	Hobet
3.	Jumlah peserta cidik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Decesal.			
Я	Jumlah peserta didik paka jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembehasan isya pendidikan			
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekotah meneringah kejuruan yang menerina pembebasan hisya pendidikan			
6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik puda jenjang sekolan menengah atas			

 IKK Contput 	IKK Octeome	Rumus	Hobet
7. Juniah kebutuha			
pendidik pada sekolah menengah	janjang kejuraan		
8 demins pendid	ik pada		
jenjang sekola). atas	meterngahi		
9. dumlah pendid	lk pada		
jenjang sekolah	menengah		
kejmtien			
18, Junian kebutuha	n minimal		
tenaga kependidi	ken pata		
jenjang sekolah atas	menengah		
11. Jumlali kebutuha	hanining n		
tenaga kependidi	kan pada		
jenjang sekolah	menengah		
loejun mani			

o IKK Ontput	IKK Octoone	Rumus	Hobet
12. Juntah teraga kependidikan pada jerjang sekolah menengan atas 13. Juntah teraga sependidikan pada jerjang sekolah menengah kejuruan 14. Juntah pendidik pada jenjang sekolah menengah sekolah menengah satas yang memiliki ijasah			
diploma empet (D IV) atau serjana (81) dan sertifikat pendidik. 15. demian pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijasah diploma empet (D-IV) atau serjana (81) dan sertifikat			
pendidik			

D.	IKK Output	IKK Octeome	Rumus	Hobet
16. J	umlah kepala sekolah			
	aenengali atas yang memiliki			
	azah diploma empat (U IV)			
- 35	tion sacjana (81), scrittikat			
	endidik dan surat tanda			
	amot pendidizan dan			
- 5	elatihan calon kepala			
	ekolot			
17	rindalt kepela sekolah			
1	nenengah kejuruan yang			
1	nemiliki ljazah diploma			
	mpat (D-N) atau sarjana			
1	Sij, semifikat pendidik dan			
	urat tanda tamat pendidikan			
	an pelatikan calon kepala			
	ekolah			
	111111111111111111111111111111111111111			
	carlais tenaga laborations			
I	oda jerjang sekolah			
	nenengsh atas yang memiliki			

o 16K Corput	EKK Outcome	Rumus	Hobet
ijazah SXA/sederajat 19. Jumlah tenega laboratorum/hengkei/workship pada jenjang sekolah menengsit kejuruan yang mendiki ijazah SMA/sederajat 20. Jumlah tenega penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SXA/sederajat 21. Jumlah tenega penunjang iahnya pada jenjang sekolah menengsit kejuruan yang memiliki menengsit kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat			

No.	IKK Corput	IKK Outcome	Rumus	Hobet
2. 1	khusus yang tarakreditasi k Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang	warge negare usia 4-16 tahun penyendang disa nilitas yang berpartisipasi dalam	sampai dengan 18 (delaman belas)	50%
3	S. Jumlah peserta didik pada pendidikan khuana yang menerima pembebasan hiaya pendidikan.		sampat dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disahi itas pada provinsi yang bersangkutan	
2	i. Jumlah kebutuhan minimat pendidik pada jpendidikan khusus			
**	 Jumlah pendidik pada pendidikan khusus 			
	i jundah kebutahan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khasus			

o-	IKK Corput	IKK Octoone	Rumus	Hobet
7.	jumlah teranga kependidikan pada sendidikan khusus			
a	Jumlah pendidik pada pendidikat khusus yang			
	memiliki ijazah dioloma empat (D-N) atau sarjana (31) dan sartifkat pendidik			
9.				
10	3. Jumlah tenaga penunjang binanya puda pendidikan khusus yang memiliki hasah SMA/sodorajat			

b) Kesebatan (Bohot Urusan : 6%)

No BEK Output	IKK Outcome	Runus	Pobot
 Jumish ES Rujukan provinsi yang memeruhi sarano, prasarano dan alat kesebatan (SPA) sesusi standar 	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Juniah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi 	25%
2 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akteritasinya	Persentase RS Enjukan provinsi yang teraknalitasi	Jumlah RS Fujukan provins, yang terakreditasi x 105 % Jumlah RS provinsi	25%
 I. dumlah dukungan lagistik kesebatan yang tersedia Jumlah pos kesebatan bagi penduduk terdampak krisis kesebatan alabat bencana dan/atau berpatensi bencana provinci 	kesebatan bagi penduduk uardampak krisis kesenatan akibat bencana dan/atau	dumah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berbotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu sah tahun ————————————————————————————————————	25%

3	IKK Corput	IKK Outcome	Rumus	Hobet
3.	Jundah SDM kesehatan di pes kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akhar bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Jundah SDM kesehatan yang tergahung dalam tim penanggutangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akhar bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		dalam satu tahun yang suma	
5.				

No	IKK Corput	IKK Outcome	Rumus	Hobet
4 1	kasahatan yang tersedia Jumlah 8DM kesehatan yang tergahung dalam Tim Berak	keschatan bagi ocang yang terdampak dan berisiko pada situas		95%
3	Cepat provinsi Juniah pelaksunaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB limas kabupaten/kota	K.B provinsi	Jumlah orang yang terdacapak dan herisiko pana situasi KLH	

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)

No	IKR O rout	IKK Outcome	Rumas	Dobot
	rowen banjir ni W8 kewenangan provinsi (ba)	pemukman niwon bonjir yang tertindungi	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terindungi dieh infrastructur pengendalian banjir	10%
	 Ponjong sungai di kawasan permukinkan yang rawan banjir di WB kewenangan provinsi (m) Luan kewasan permukinan 	olch inhastruktur pengentukun benjir	di WS Kewenangan provinsi Itaj x 100 % Luas kawasan permukiman rawan hanjir di WS Kewenangan provinsi (ba)	
	sepanjong pantai yang rawan		Luas kowasan permukiran sepanjang pantsi rawan abrasi	10%
18	 Panjang pamal di kawasan permukiman yi rawan abassi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi [ha] 		infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m)	

3	IKK Catpot	Hills Ondeome	Rumas	Hobot
1	Rencuna Tata Pengaturan dir ian tata pengairan/rencana pengelokan sumber daya dir MS Kewenangan provinsi			
1 1	Encous Teknis tata engaturan air dan tata engairan/rancana engelokan sumber daya air owerangan prosinsi			
3	kata prusaman dan samua sengaman pantei dan sungai nilik pemerintah provinsi			

No	IKK Output	Hilly Outcome	Romas	Habat
2.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi batik Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi batik Persentase panjang jaringan irigasi terster dalam kondisi haik	irigasi kewenangan provinsi yang dilayuni	Luas irigasi kewetangan provinsi yang dilayari oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direbabilitasi (ha), dioperasi dan pelibara (ha) di tahun eksisting ====================================	.5%
3.	Tersusum dan ditetapksunya JAKSTRADA provinsi Jumich BUXD dan atau LPTD provinsi pervelenggaran SPAM Jumich bin yang dikerikan	yang dapat terlayani melalui penyaluran ah minum cursh lintas labupaten/kota terhadap kebutuhan pemeruhan kapasitas yang memerihlan pelayanan air minum	proyektran air minum mush limas kahupaten/kots 	20%

No	IKK Carpot	Hilly Outcome	Rumas	Hobot
	SPAM 5. Jumich kerja sama penyelenggurun SPAM dengan pernerintah Pusat dan Pemerintah danan	labapaten/kota		
4.	 Jumlah SPALD Regional Total Separates SPALD Regions Total volume Limbelt yang musuk te SPALD Regional Jumlah sarana dan prasarana pengdokian limbelt dourratik Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usahat Provinsi Pengdoki Limbah Domestik (Ada/Tidak) 	domestik o'el) 8PM.	현존 경우 아이들 때문에 가장 하는 것이 없는 것이 없다.	20%
5.	 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapisan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi 	Basco Isanem tapan jabun	Panjung jalan kewenangan provinsi yang mantap 	_3%

ia	IKK Camput		Hily Outcome	Romas	Hobot
2.	Dokumen reneama pengambangan Jadinga provinsi	induk n jalaa		wilayah provins:	
8.	Penjang jalan yang dibe	നളവ			
4.	Penjang jembatan dibangun	VR.			
5.	Panjang jalan ditingkatikan (struktur)	yang hingsi)			
fi.	Panjang je ubatan diganti/dilebarkan	yang			
7.	Penjang jaken direkonstruksi direhabilitasi	tang étan			
8.	Panjang jembatan direhabilitasi	yong			
9.	Penjang jalan yang dipe	dibero			
10	Panjang jembatan dipelihara	young			

No	нкк Олерот	Hills Outcome	Rumas	Hobot
6. 1	. Jum'ah Pelathar: Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	10%E
2	 Jum.ch tenaga kerja konstruksi yang terletih di wilayah provinsi 	경기가 어린다가 하고 보는 생산이 하였다.	yang dibuktikan dengan serinisat pelatikan ah i 	
3	. Junich tenaga kerja	SACILIAN POSTURAL SELE	jumlah kebutuhan tenaga ahli di	
	konstruksi tadatih yang tersertitikasi ahli di wilayah pineinsi		wilayan provinsi	
4	. Terselenggaranya Sistem Informesi Pembina Jesa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir			
5	 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstraksi di wilayah provinsi yang bersamber dari APRD provinsi 			

So IKK Carpor	Hilly Outcome	Romas	Hobot
 Tersedianya data dan informasi potensi pasar asa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber cari APBN 			
 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendaman binoya. 			
 Fersedianya data dan profit CPD sub urusan jasa konsuruksi provinsi 			
9. Tersedianya data dan informasi Pelatinan Tenaga Ahli Kenatrukai di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri asan melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan			

No BEE Comput	Hilly Outleone	Romas	Bobot
Kinja (LPKK)			
10: Tersedianya data dan			
informasi tenago kerja			
konsmittel yang terletih di			
wilayah provinsi yang			
dibuktikan dengan sertifika:			
pelatihan abili			
11. Persedianya data dan			
informasi tenaga kerja			
konscuksi terkriin vang			
tersertifices: ahli di viloyan			
provinsi			
12. Tersedianya data dan			
informasi Insail pengawasan			
ketidalesesuaiam jenis, sifat,			
kosifikasi, layanan usaha.			
bentuk, dan/alan kadifikasi			
usaha dengan kegiatan usaha			
jasa konstruksi yang menjadi			

va .	IKK Campot	Hilly Outleonic	Rumas	Hobot
10. TV 11. TV 11	owinangari pengawasannya breedianya data dan domasi kecelekaan susuri kal pada proyek yang enjadi kewenangan ingawasannya data dan domasi hasil pengawasan birlaksesnaian jenia, silat, asilikosi, layanan usaha, entuk dan/atau kuchilikosi saha dengan segmentasi isar jasa konstruks yang enjadi kewenangan ingawasannya			

dj. Perumahan Rakyot (Bobot Urusan : 6%)

lo	IME Output	IKK Cuttonic	Rimus	Police
	t. Sumlah sumah yang berada	Persontase warga negara korban bencana yang	10070000	25%
	5. Annilah unit rumah korten benyana yang dibangun kembali sesuai dengan remanankai			

BCK Octput	IKK Ontonic	Rumus	Robet
beneana yang dibangun beneana yang dibangun bent/relokasi sesuai dengan rencana aksi			
Tundsit uni. Jan lokasi rumuh sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bendana			
himlah KP, KK dan Jiasa korisan bencana yang terfosilingsi			
e. Jumlah, hasan dan lokasi pencadangan ia tan			
	beneana yang dibangan beneana yang dibangan bencana aksi lambah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana lambah KP, KK dan disa korban bencana yang terfesilatasi lambah kasan dan lokasi lambah kasan dan lokasi	bensana yang dibangun bensana yang dibangun bensal-relokasi sesum dengan nensus aksi Tumbih uni, dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementam korban bensana himlah ET, KK dan Jisa korban bensana yang terfesihis.si Tumbih, hasan dan lokasi	. Annilah unit rumah korban bensana yang dibangun beru/relokasi sesum dengan nensans aksi Tumbih unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bensana himlah ET, KK dan disa korban bensana yang terfesihis.si Jumbih, hasan dan lokasi

ю	вск Острат	IKK Ontonice	Rumus	Pohet
. 1	penerima kwazan yang telah mendapatkan tasihtasi ganti kerngian aset propenti	yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sowa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Punjah	25%
2	Dumlah rumah tangga penerima keguatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi pengguntan hak etes tanah dan/otau bangunan berdasartian pencana pemenuhan SPM	layak hunt	Layak ibini x 100 % cumlah total nimah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	
3	Jumksh rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapankan penyediaan rumuh layak hunt berdasarkan renoma pemenuhan SPM			

No	BGK Octput	IKK Criterine	Rumns	Hobes
2.	 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyerikan rumah ayak huni terdasarkan rencara pemeruhan SPM Jumlah lucsan (IIa) kawasan pencakinan kumuh > 10-15 Fa Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH Jumlah lucsan (IIa) kawasan kualitas RTLH 		Lucs kawasan kurunti 10 – 13 Ha yang ditangan 	2064
1	 domlah pemukiman yang berbaditasi PSU dumlah pengenabang yang bersertifikasi 	perumahan yang sudah	dinulah satuan perumahan yang sedang dibangan terbadikas PSD 	25%

No	BCK Octput	IKK Ontonice	Ramus	Hobet.
	Jumlah pengembang yang teregistrasi Jumlah pengembang yang mendapat penyeluhan atau pekatiban			

ej - Ketenderannon, Keter) ban Durum dan Perlimbungan Masyarakat (Robot Greson - 69a)

No	IKK Output	Edit Outcome	Rumus	Bobot
3	 Jumish pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Sob/Koto yang ditangani Jumish Satilumas yang tertahhdan diculothkan Jumish satian presarata mininal yang dipentihi Jumish Perda dan Perkada yang ditegakkan 		Jumish pengaduan yangdiselesaikan x 100 % Jumish pengaduan petanggaran yang masuk	25%

No	KE Ourpet	Tsk Outcome	Romes	Babor
	Jumlah Polisi Pameng Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS Jumlah SOF dalam penegakan Perda dan Perlada serta penanganan gangguan Trantikum			
2		Personisse Penla dar Perkada yang dregakkan	dumlah Perda/Prokale yang merinat sanksi yang ditegalakan x 100 % Jumlah kesehiruhan Perda dan Perkada yang merinat sanksi	3.5%
2.	Fenyediaan/pentakhiran dosumen kajian risiko benezen provinci	Persentase penyelesaion. diskumen kebensansan sampai dengan dinyatakan sah/kgal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebene-usan yang disusun 	20%

No	KK Output	1sk Outcome	Rucius	Babat
	Fenyediaan/penutakhisar dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi Fenyediaan/penutakhisar dokumen rencana kontijensi provinsi			
4	Telaksansan pelatikan penwegatan dan mitigasi bencara provinsa dan kabupaten/kota Felaksansan menitering dan evaluasi dalam perencansan pemenuhan SPM subtrusan bencana daerah kabupaten/kota.	Ретвог Ізэк: ретранураны ріа Іспична	dumbah kalimpater/kuta yang terfasilitasi dalam penanganan pro penengai x 100 % dumbah kalimpaten/kota di wilayah provinsi	2.5%

No	KK Output	18K Outcome	Runus	Babot
5.	Fenyediaan dokumen kaji cepat bencana provinci Respon cepat penanganan dan ret bencara provinci	Personiase penanganan, tanggap darurat bencana	Jumlah kabupatèn/kota yang terfasiktasi dalam penanganan tanggup darumi bencana 	
	Pencacian, pertolingan dan esakuasi kerban bencara provinsi		Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang	
	A. Fenyediaan logistik penyelamatan dan evekuasi kuchan bencana provinsi		mengalami bencana	

t) - Sosia, (Bobot Urusan : 5%)

lo.	IKK Output	IKK Cutsome	Ramus	Bobot
i.	disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan		Jumlah penyandang disabilitas terlanter di dalam penth yang terperah kebutuhan dasarnya 	20%
	 Jumiah penyandang disabilitas terlantar yang one terima paket as utang di dalam punti 		membutuhkan rehabilitasi sosial /asser(i dalam penti	
	 Jumiah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) 			
	 Jumish slat harrin yang disediakan didalam panti 			
	 Jumiah perbakakan kesehatan yang disediakan di dahan perdi 			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Rober
	 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti 			
	// Jumlah perbekalan kesehatan (perakatankesehatan) yang			
	disetiakan di dalam panti			
	Jumiah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti			
1	Jumlah paket bimbingan fisik, mentel, spiritus, dan sosial yang dilaksanakan dalam panti			
	10 Junish paket bintingan aktivitas hidup schari-hari yang dilaksanakan di dalam pand			

lo IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pober
11. Jumlah Goslal/Tenaga Roseja Sosaal yang disedia dalam partil 12. Jumlah peny disabiltas tertantan ditasilitasi pembuatan	kan di sadang yang		
Induk Kependuduk dalam partii	an di yandang didalam apatisan		
14 Junish peny disabilitas terlantar punti yang mend			

No	вкк опфи:	IKK Outcome	Rumus	Robet
	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam parti yang mencapatiam pelayanan reunifikasi keluarga			
1.	Juniah Anak Terlantar yang meneriana paket perbaakanan di dalam pauti sesnai standar gizi	Ansk Terbritan yang	Jumish Anak Teriantar di dalam panti yang terpenchi kebutuhan dasarnya 	5/0%
	 Junian Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti 		Populasi Anak Terantardi saerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi susial dasar di Islam	
	 Juniah astana yang tersedia dan mudah diakses (panti) 		paoti	
	 Juniah slat bastu yang disediahan didahan panti 			
	 Junish perbekalan besehatan jokat obatani yang 			

No.	BGG Output	IKK Outcome	Romus	Pobet
6. 7. 8.	disediakan di dalam panti disediakan di dalam panti disediakan di dalam panti di miah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti dimiah tenaga kesehatan jeokter, psaklater, peksas medis) yang disediakan di dalam panti	IKK CHICUTE	KJDUS	ROBBE
90	Juniah pekerja Sosial protesional/ tenega liesejahteraan sosial yang disediakan di dalam penti Juniah paket bindingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilukamatan dalam punti			

ło	IKK Output	IKK Outcome	Romus	Pobet
ło	11. Juniah paket bintingan activitas nidup schari-hari yang di aksanakan di dalam panti. 12. Juniah Anak terkatar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Rependudukan dan karta identitas anak dan acta lahir di dalam panti. 13. Juniah Anak Perlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke ikyanan pendidilkan dan kescistan dasar	IKK Cutcoure	Rumus	Pobet
	14. Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendupatkan pelayanan pemilipanan keluanga			

No	IKK Output	IKK Outcome	Romus	Pobet
	15. Januah Anak Terlaman dadam panti yang mendapatkan pelayanan remifikasi ketianga			
¥.	dumlah Lamjut Usia Terantar yang menerima paket permahanan di dalam panti sesuai standar pisi		Jumlah Lamut Usia Terlamat di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasanya 	2066
	 Jumlah Laujut Usia Terantar yang meneriman paket sandang di dalam pacti 		Populasi Laujut Usia Terkutar di onerah provinsi yang membutuhkan rehabilitsai sosial dasso di dalam panti	
	Jumlah ssrams, yang tersedia dan mudah diakses			
	Jumlah slat bantu yang disedisekan didalam panti			
	 dombdt perbekslant keschatan yang disedisisan di dalam panti 			

No IKK OU	tput	IKK Outcome	Rumus	Hobet
sesial young delain penni 6. Jumlah tana [Jokter, psik	daiem panti er bimtingan spiritual dan dikaksusakan ga kesehatan dater, peksos			
dalam permi 9. Junitah per profesional/te kesejahteraan disoliakan dis 10. Junitah pak aktivitas hidu	naga sosial yang dalam parti			

No	IKK Output	IKK Outcome	Romus	Robet
	11. Junilah lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuutan Komre Induk kependucukan di dalam pauli 12 Junilah lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses kelayanan dan kesehatan dasar			
	12 Jumlah Lanjut Usa terlanter didalam pant yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluanga 14. Jumlah Lanjut Usia Terkintar didalam panti yang mendapatkan pelayuran reundikasi keluanga			

No	ikk Output	IKK Criteonie	Rumus	Hobet
4	15. Jumlah Lanjut Usia Tertantar yang mendapatisan layunan pemulasaman. 1. Jumlah Gelandangan dan Fengends yang menerima paket permakanan di dalam parti sesasi standar gizi. 2. Jumlah Gelandangan dan Fengenis yang menerima paket sandang di dalam	Persentase Gelandangan dan Pengenis yang terpenuhi zebutuhan	Jumlah Gekandangan éan Pengemis di dalam panti yang	20%
	panti 3. Jumlah sajama yang tersedia dan mudah diakses 4. Jumlah dat bentu yang disediakan didalam panti 5. Jumlah perbekalam kesebatan yang disediakan di dalam panti		parti	

0.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobst
6	Junilah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti			
Y	 Jumlah paket buntungan tisik, mentai, spiritual dan sosial yang dilaksausdam dalam pendi 			
63	 Jumlah tanaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos modis) yang disediakan di dalam perm 			
9	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenega kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti			
)	it. Jumlah paket bintingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksansikan di dalam panti			

No	IKK Output	IKK Critoonie	Romus	Robot
	11. Junilah Gelandangan dan Fengemis yang mendapat timbungan kererampilan daser 12. Junilah Gelandangan dan pengemis yeng difasilitasi pembuatan Nomor Induk			
	Februducukan, KTP, Akta Februiran, Surat Nikah dan/atau kIA di dalam panti 12 Jumlah Gelendengan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan aktas ke layanan pendidilkan dan			
	kesehatan dasar 14. Jumlah Gelandangan dan Fengemis didalam punti ya mendapatkan pelayanan penulusuran keluanga			

No	BKK Output	IKK Onfoore	Romus	Pobet
5.	15. Junilah Gelandangan dan Fengenia didalam panti yang mendapatkan pelayanan remitikasi keluanga. 1. Junilah kerban bencana yang memiajai makanan. 2. dunilah kerban bencana yang memiajai makanan. yang menerina paket sendang. 3. Junilah tempat	Persentase korban bendana alam dani sosial yang terpandia	Jumish kortan bencana alam can sasial yang terpe mbi kebutuhan dasarnya 	Hobst 20%
	Jumlah paket permakanan khusus negi kelompak irutan Jumlah kerban betesina yang		setelah tanggap darumit bencana daerah arovinsi	
	dukungan psikososial			

No	lick Output		IKK Outcome	Rumus	Robet
	Jumlah Pekerja Profesional/tenaga	9ocial			
1	kesejahteman tan/atau relawan ses tersolia				

U. asan Feneriatahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Basar

a) Druega Korja (Folest Urusau ; 3%).

No	IKK Output	IKK Gutcome	Ramus	Pobot
L.	 Dokumen perencansan tenoga kerja provinsi. Persentasa akurusi proveksi indikator dalam rencana tenaga kerja. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja. 	kabupaten/kota yang menyusun rencam	Jumlah kabupaten/kota yang menyukun rencana tenaga kerja x 105% , umlah kabupaten/kota	

No	ikk Output	IKK Outcome	Rumus	Pobet
	4. Jimilah kabupaten/koti yang telah dibina dalam penyusunan KFK perusahaan.			
1	Persentase penerapan Program PBK dengan kralifikasi KKNI / okupasi Besentese instruktur bersertifika kompetensi	Bersertlitkst Kompetensi	.turilah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 	2066
	Resio jumiah instruktur terhadap peserta pelatikan. Pe sculisso pengsupgan yang.			
	diletii 5 Persentase Iulusan			
	be sertificar kompetensi 6. Persentasse penyeraman			
	halasson. 7 Persontese LPK yang			
	terakreditasi			

No	lisk Output	IKK Outcome	Romus	Rober
	Jundah Calon Pekerja Migrant Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan			
	9 Junikh pelatiban Cabu Pelzerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (C-MI/OTM)			
Į,	Persentase perusahkan yang meneropkan program peningkatan produktivitas	Tingkat Produktivitas F Temaga Kera:	PDRB tehun berjalan talas dasar horga kenston 	2066
	Persontase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi idaring peringkatan produktivitas			
	 Getar tinglest produktivi as total. 			

io.	IKK Output	IKK Onfoure	Rumus	Pobet
. 1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).		menerapkan tata kelola kerja yang	20%
9	Persentase Pernadaan yg (els-h-metriliki PKB.	[FP/PKF, LKS Biparit, Struktur Skala Upali,		
ą	Rekovituket tehunan jumkh anggota Berikat Pekerja / Berikat Buruh di perusahaan pada tahun n	BPJS Ketanagake jaan).		
1	Persentuse perusahaan yang sucah menyusun struktur szak upah			
5	 Fersenrase perusahaan yang telah terdahar sebegai peserta DEJS Ketenagakerjaan. 			
6	Percentase perusahaan yang telah membentuk L88 Bipartit.			

o IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Robet
Porsentase jumlah perusahasa yang berselaih Jumlah megok kerja			
9 Junish penutupan perusaksan			
10. Jumlah persebsihan kepentingan			
11. Jumlah perselisihan hak 12. Jumlah perselisihan antar 8.7/8B di perusahann			
 Jumiah Perselisihan PEK Jumiah pekerja/buruh yang 			
ter-PHK 15. Junish persetsihan yang diselesakan melalui perundingan bipartise			
16. Lembuga Kerja Sama (LKS) Triportit yang diberdayakan			

No	BKK Output	IKK Onfoore	Romus	Pobet
	17. Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dingan peruturan perundangan. 18. Persentase persetsihan hubungan industrial yang diselescrikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mentator Umbungan Industrial			
1.	peractujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas mewinsi 2. Jumlah Surat Persehunan Penempatan Antar Kerja	(dalam dan begeri) melsiki mekanisme layanan untur berju lintas daenah	yang ditempatkan x 100%	2056

No	вкк Опфи:	IKK Outcome	Romus	Pobet
а.	diterbition oich dings provinsi Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oich			
	swasta dalam satu wilayah provinsi			
4.	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi			
5.	Jumlah Tenaga Kerja khusus terdahar dalam satu provinsi			
6.	Jumlah pejabat fungsonal pengantar kenja			
7.	Junilah Lembaga Fenembatan Cenaga Kenja Swustu (LPTK3) yang mendapatkan izin dari Fenerintsih Daerah provinsi.			

o IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobet
6. Junilah Lembaga Penyatur Pekerja Rumah Tangga JEPP-ST) yang mendapatkan izin dan Femerintah Jacath Frovinsi. 9. Junilah penempatan tenaga kerja melalui informasi Fasar Kerja JIPK] online/sistem informasi ketenagakerjaan JSISNAKERJ 10. Junilah Pekerja Migran Indonesia JPMI) / Tenaga Eerja Indonesia (JEMI) / Song difasilitasi kepulangannya 11. Junilah ijin Kantor Cabang Feresalaman Pekerja Migran Fekerja Migran Indonesia	IKK Critcon e	Rumus	Pober

No	iisk Output	IKK Ontonice	Rumus	Pobet
5 1	Ferientzatari Tenaga Kerja Ladanesia Swasta (PPTKP) yang diserbitkan. Jumlah Pes pelayanan keberangkatan dan keberangkatan dan kepelangan Fekerja Migran Ladanesia (FMI) / Tenaga kerja Indonesia (FKI). Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu berja dan Waktu Isticahat (WKWI). Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kama Tengupsitan.	Person tese perusahaan vang menerapkan peraturan perundangan bidang keteragakerjaan	∑ Total perusahaem yang menerapkan perutusan peruncangan ketenagakerjaan pada tahun n x 100%. ∑ Total perusahaan yang terdahar melahi mekanisme wa ib lapar ketenagakerjaan pada tahun n	2064

lo IKK i	Output	IKK Cutcome	Rumus	Robet
Jaminan Sc 5. Jumlah P menerapku Peranguan 6. Jumlah P	sial erusahaan yang a Norma Kerja			
Kerja,	n dan Kesehatan			
	nvidikan Tindak negalierjaan			
mendaftar Ketenagaka	rusahaan yang Wajib Lapor jisan (WEEP) onbie			

b) Pembentaycan Perempuan dan Perlindungan Anak (Booot Urusan : 3%)

No	IKK Output	Tax Outcome	Ruicus	Bobot
Į.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUC Jumlah program/kegiatan PUO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi nelahi arahisis pender di tingkat provinsi		Juniah ARG pada belanja langsung APRE 	385
2.	Jimiah media massa petak, ekski cuiki yang bekeja sama dengan pemerintah provinsi (Einas PPPA) intuk melakuka t kili pencepahan kekerasan terhadap anak Jamiah kedaga bejaran sitak yang ielah mendilisi standar pelayanan minimal	terlisday stude per	Jumlah anak (penduduk usia ku sug dari 18 tahun) kaban kekersaan yang ditangani inatansi tingkat provinsi yang didamping 	3/354

No	BCK Output	Idk Ouncome	Runus	Pobet
	Forsentase korban kokerasan anak yang terlayeni Junian kuntaga tayanan anak yang mendapat			
	pelatihan 5. Juniah lembaga layanan anak yang mendapatkan hantnan keuangan/lasilitas oleh Pemerintah Baerah Provinsi JAPRO provinsi			
3	Junish kehijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TP-D pada perangkat daerah yang andah dierahasai	terhadap perempuan, termusuk TPPO (per 100.000) pencuduk	z 100.000	3354
	 Jumish Embaga penyedian layanan perlindungan bak 			

0	IKK Output	IGC Outcome	Runus	Hobst
	perempuan yang telah terstandarisasi			
3	Persentase korban kekerosan perempuat, yang terlayani			
1	Juncah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan			
.5	Jumah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/Sasukas oleh Pemerintah Liserah Provinsi (AFBO provinsi)			

c) Pangan (Bobot Jrusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Cutoone	Ramus	Bobot
ι.	Tersedianya infrastruktur pengudangan dan sarana pendukung kilanya antuk penyimpanan cadangan pangan	pengan	- uratah cadangan pangan pravinsi	1.30%
	Tersedianya dan tersahukannya pangan pokok dan pangan lainnya			
	 Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi 			
	 Tersedianya harga referensi daorah untuk pangan lokal 			
	 Terpromosikannya target konsumsi pangan sesual dengan angka kecakupan giri 			

0	вкк Опри:	IKK Cutcome	Rumus	Robet
0	Tersediagya peto ketahanan dan kerentanan pangan provinsi			
7	Tersedianya informasi situasi keremanan yangan dan gizi provinsi			
14	l. Tertanganinya kejadian kecasa san pangan			
9). Tersaluriannya cadangan pangan pata deerah rawan bencana pangan			
1	o, Teregismasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern			

d) Pertanahan (Bobot Urusan ; 2%)

o IKK Output	IEEE Cutcome	Rumus	Bobot
penerapan tanah lok 2. dumlah masalah kerugian dan	ganti dengan peruntukkan santunan tenalunya diatas isin tengunan lokasi dibandingkan dengan luas zin keasi sangan pang diterbitkan erinu tanah	lokusi	3876

No	IKK Output	IKK Cuteome	Ruraus	Pober
2.		Persentase pengadian tanah untuk kepentingan umum yang selesal tepat wakta	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum seksal tepat waktu	23%
8.			Lases principalisationalisations tapalityong telah dinambatkan sesual dengan peruntukkannya diatas izin tokasi intas kati/ kota	3354

ej Lingkungan Hidup (Hobot Drusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Cutcome	Rumus	Pobet
I.	1. Hasal perbitungan provinsi terbedop: 2. Indeks kualites sir (IKA) 3. Indeks Kualitas Udara (IKU) 4. Indeks tutupan hutan (ITH) 6. Indeks tutupan hutan (ITH) 6. Indeks tutupan hutan (ITH)	trdeks Euchtus Eingkungen Hichup (IKEH) Provius.		olife
2,	dan PUU LII yang diterbitkan oleh pemerintah	jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin		30%
	 Essio pajabet pengawas tH di daersh (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang teh lingkungan, teh FPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi. 	diterbitkan olea Pemerintah Daerah	diterbidan Panerimah Provinsi 	

io.	IKK Output	IKK Cuttome	Rumus	Hobit
3	Fonetapan hais MHA terisait nengan PPLH yang berada di cha atau lebih daerah kab/keka dalam t provinsi			
1	Perfusibushga kegkuan peningkatan pengetahuan nan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPC-E			
ä	Perfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan tan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH			
6	Penenganan pengaduan masyaraket terkait izin lingkungan dan atau izin EP.H yang diterbilian oleh pemerintah daerah provinsi			

No	ікк Опри	IK's Cuteon e	Rumus	Pobet
	Can usaha dan atau kegintan yang lokas: dan berdempak limas kabupaten/kata			

i) - Administraci Kependudukan dan Percatatan Sipil (Fadut Umsan . 259)

No	IKK Cotpu.	IKK Outcome	Runes	Pobot
l,	Fasiltasi pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam sotu tahun	Penysjian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun x 100% 2 kali	30%
		Pemanikatan data kependudukan	CPD Provinsi yang telah memanfastkan data kependudukan berdasarkan perjanjan kerjasana 	50%

g) Pemberdaycan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beliet
60 0		Persontese pengentasan desa tertinggal	Jumiah desa tertinggal yang memeruhi kriteria desa herkerahang per telium berdasarkan linieks Desa Membangun per tuhun ———————————————————————————————————	30%
	desa tahun sebelumnya S. Jumlah tembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terbasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan Jumlah peningkatan desa yang tembaga kemasyarakatan dan	Persentuse perungkatan status desa mandiri	Jumah desa berkembang yang memerahi kriteria desa mandiri per tahun berdassaksu Luleks Desa Membangun per tahun x 100% Jumah desa berkembang (perswel tahun n	50%a

No	вкк Оприт	IKK Octoone	Rumus	Pobet
	lmikaga adatrya melaksanakan kegiatan ekonomi produktit dan pembentayaan			

h). Pengendallan Fenduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan : 2%

413	tick Output	DKK the barn re	Ennus	Holas
3.	Orand Design Fembangunan Kependudukan (ODPK) yang di Perdakan Median Usta Kawin Perlama Perempuan (MUKF) seluruh wanita umur 2549 tahun	TFR (Angka Kembirum Totali		33%

No	ikk Output	IKK Octoone	Rumus	Pobet
	4. Persensase masyandasi yang terpapar isi pesan Program EKBPA Jodvokusi dan KIE; 5. Junisi stokeholders/penjangku kepentingan dan mitro kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan yang berperan seria aktif dalam pengelelaan program KKISPK.			
2.	Persentase Pasilitasi Keaclistan [Paskes] yang Kap melayani KB MKJP Persentase Peseria KB Aktif [PA] Merode Kontrasensi Jangka Panjang (MKJP) Pemerintal Bactah Provinsi Fang tremiliki Kelompok Kerit KKLPK yang efektif	koutrasepsi Moden. [Modern Contraceptive	Junish peserta KB Aktif Modern 	33%

No	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Pobet
	Persentase pelayanan KD Pasca Forsalinan			
	Persentase kesertaan 3B di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah Persentase kesertaan KB keluanga Perseicia Faminan Luan (PBI)		Jum ah PLS yang ingin ter-KB telapi tidak terlayani 	3356

i) Perhubungan (Bobat Urusan : 3%)

No	IKK Output	Hilk Outcome	Runus	Bobot
	tosilins penyelenggunam tosilins penyelenggunam terminal penumpang sugkutan tipe B. Penetapan tarif angkutan olang amar isota dalam provins: serta angkutan perketaan dan perkesaan yang melumpani 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	2	Rasio koncktvitas Provins. – (iki x hobot ungkutun julan) – (iki x Robot ungkutun julan) – (iki x Robot ungkutun julan) – (iki x Robot ungkutun julan) – (iki jungkutun julan) – (iki jungkutun julan) – (iki jungkutun julan) kelu tuhan trayek pada provinsi tersebut) – (iki (angkutun Sungai, danau dan penyeberangan)–juntah lintas Penyeberangan yang beroperasi pal provinsi telepatuhan lintas penyeberangan jungkutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)	30%

No	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Pober
			Ketarangan: IKI JAngkutan Jalanj Jumlah trayek yang dilayaru adalah jumlah trayek perinda di santah trayek AlAP Jumlah kebutuhan rayek adalah jumlah kebutuhan trayek perinta dalam surun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu	
			K2 (Angitutan Sungal, Denau, Penseberangan) - Jundah Entas penyeberangan yang beronerasi adalah jumlah lintasan perintis ditembah lintasan komersil - Jundah kebutuhan lintas	

No	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Robet
D	вки сипри:	IKK OCRODIC	adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan balk lintas penyeberangan permis maupun komersit umtuk menghubungkan antai wikyah yang direncanakan dalam kuma waktu tertentu. Sibot Angsutan Jalan atau Sungsi, Danan dan Penyeberangan: 1. Wikeyah yang tingkat peleyanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan bebet angkutan julan 309 = 70, beset angkutan julan 309	Hobes
			Wilayah yong ingkot prisyanan angkutan laut can	

No	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Pobet
			penyeberangan sama dengan dibandingkaa dengan angkulanjalan (bebet angkulan jalan = 30) 5 Wilayah yang Engant pelayanan angkulan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkulan jalan (bebet angkulan SD2 = 30) (bebet angkulan jalan = 70) 4 Wilayah yang tidak memiliki angkulan penyeberangan dan kuti (bebet angkulan SD2 = 0, bebet angkulan jalan = 100) 5 obot Trayek utau Lintas dengan helicansa tinggi (box dalam seminggu, bebet = 1)	

No	lisk Output	TKK Octeome	Rumus	Hober
			 b. Bobot. Trayok atau Lintas dengan fickmensi sedang (3-4 dalam seminggui, bobot = 0.8 c. Bobot. Trayok atau Lintas dengan fickmensi rendah (<3 dalam seminggui, Bobot = 0.8 	
2.	Persentase pelaksunaan manajemen dan rekayssa lalulintas untu jaringan jalan provinsi			50%

j) – Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Uniteome	Rumus	Hobet
L.	menggunakan akses internet yang disurankan yang	Perangkat Daerah JOPO, yang terhubung dengan	dengan akses internet yang disediakan oleh Dinga Kominio 	35%

No	iisk Output	IKK Octoone	Rumus	Robet
2	Konlino Persentase perangkat daerah yang menggunakan oleses internet yang berkusikas yang disedakan Dines Konlino			
а.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi inira pemerintah yang disediakan Limus Kominfo (berbasis suara, video, teks, deta dan sinyal lainnyay dengan memanharkan jaringan intra pemerintah.			
2. 1	bopásaram bupgy berpa	Publik yang disebugga akan sesans online dan seintegrasi	dum ah Layanan Publik yang disebenggarakan secara online can berintegussi	30,694

No	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Pobet
de de de la	main dan sub domain stonst Penyelenggura sestal dengan sestal dengan sestal dengan sestal Menteri Kuminlo anye 5 Tahun 2015 tentang gistrasi Nama Domain stonst Penyelenggura gara sentase perangkat daerah ng mentiliki portal dan tus web yang sesual stancar asentase perangkat daerah ng mentiliki portal dan tus web yang sesual stancar asentase perangkat daerah ng mentiliki khusus yang tetaphan sesana dengan dengan perundang dangan			

ło	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Pobet
	4. Persentase layanan SPSE (layanan publik dan layanan administras) pemerintuhan) yang telah dimplementasikan satara ekktranik 5. Persentase layanan SPSE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang mementaatkan sertifikat elektronik 6. Persentase sistem elektronik			
	yang terdafkar sesuai kelentuan peraturan perundang-undangan 7. Persentuse layanan publik dan layanan administrasi			
	yang terintegrasi dengan			

lo IKK (output	IKK Octoone	Rumus	Pobet
sistem peng	aditing layarion			
pemerintah				
8. Persentase p	elangkat daerah			
yeng mengg	inakan Tayonan			
posat data pe	merintah			
9 Persentase p	erangkat daerah			
yang manyi	mpan data di			
pusat data pe	merintan			
10. Persentascij	erangkat daerah			
yang	memperbaharui			
datanya ser	oad sildus jenis			
data (se	suoi renstra			
kominte)				
III. Fersentisse	data yang dapat			
berbagi pak	ı.			
12. Fersentase j	enangkat daerah			
	engia plementasi			
	ng mendakung			
smart city				

No	lisk Output	TKK Octeome	Runnis	Hobst
	13. Fersentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas kominia 14. Tersedianya peraturan daerah atau peruturan kepala daerah terisait implementasi e-government			
5.	Persentase komunitas masyarokut/mitro strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi Persentase konten ricumasi	yang menjadi sasama penyebarah informasi puldik, mengelahui kebijakan dan program prioritus pemerintah	publik, mengetahui kebijakan dan program prieritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi x 100%	30%

No	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Pobet
3. Pe lay ye de ps	PRAKOM) recutase diseminasi dan yanan informasi publik ng dilaksanakan sesual mgan strateg komunikasi PAPKOM) dan SOP yang lah ditetapkan			

Keperassi, Useha Kecil dan Menengah (Bobot Urusan 2%)

	BSR Output	TKK Giutoome	Runns	Holiat
i. :	Persentase taskitusi penerbitan ijir titaha simpan pinjam unfuk koperasi dengan wikiyah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam i (setu) decish provinsi 2. Persentase fasilitasi	yang berkualitsa	Junitah kaperasi yang meningkat kunitesnya perdasarkan KAT, volumcusaha dan aset 	30%

BGK Output	BKK Octeome	Rumus	Hobet
panerbitan izin pembukaan kamar cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjum oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan tintas daerah kebupaten/kota dalam I (satu) daerah pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi 4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang			

IKK Output	IKK Octeome	Rumus	Hobet
diniki kaschatanavanatuk kaperasi dengan wilayah keanggataan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 5. Persentasi kaperasi yang mengikuti pelatihanuntuk kaperasi dengan wilayah keanggataan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1			
(setti) daerah provinsi 6. Persentase jumlah singgota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasiamuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1			

(setu) daerah provinsi 7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perdidikan dan pelatihan perkoperasianantuk koperasi dangan wilayah keanggotaan tintas daerah kebupaten/kota datau I (setu) daerah provinsi		
8. Persentase Basilitasi penerbitan sertifikat Nomor irduk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 9. Persentase koperasi yang		

IKK Output	IKK Octeorie	Rumus	Hobet
pambiayaan untuk koperasi			
dengan wilayah keanggotaan			
lintos decrati			
kabupaten/keta dalam 1 (satu) daerah provinsi			
10. Persentase, yang diberikan			
dukungan Sasilitasi			
pemasaran nutrik keperasi			
dengan wikwah keanggotxan			
lintas decrah			
kabupaten/kota dalam 1 (sefti) daerah provinsi			
11. Persentase koperasi yang			
diberikan dukungan fasilitasi			
pendampingan kelembagaan			
dan usahu untuk koperasi			
dengan wilayah keanggotaan			
lintas dacrah			

	IKK Output	IKK Octeome	Rumus	Pobet
	kabupaten/kota dalam 1 (softi) daerah provinsi 12. Persenfase koperasi yang dibenikan dukungan fasilitasi kemituwan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan tintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (sotti daerah provinsi			
2.		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Junish waha kecil yang menjadi elisusaha 	50%
	sistem oviline data system (CDS) 3 Persentase junisht usaha kecil yang bermitua			

IKK Outpic	IKK Outcome	Rumus	Pobet
4. Persentase Jumah usaha kecit yang diberikan dulungan balittasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha			
 Persentasa juntah usaha kecil yang diserikan dukungan Sasilitasi pemasajan 			
6 Rasic usaha zecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelat han			
 Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha. 			

i) Penanaman Modal (Bobot Urusan : 3%)

No.	IKK Output	Hik Outcome	Rumus	Bobot
120	PURDA mengenai pomberian fasihtos/intensif penanuman medel yang menjadi kawenangku daendi provinsi		Dumlan investasi tahun n-jumlah investosi tahun n-juli provinsi	120%
	2 Standar operasional presedur pelaksandan pemberian fasilitas/insertif penanaman model		provinsi	
	3. Laporum evaluasi peleksencen pemberian fasilitas/inservif penanaman model			
	4 Kagistan seminar bistis, forum, one on one meeting			
	5 Keglatan pameran penanaman modal			
	6 Kegistan peterimaan misi penausman medal			

lo IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Robot
 Konsultasi perizinan dan me perizinan penanaman medal 	24		
 Penerbitan perizitian dan no perizinan penanaman modal 	201		
 Laporan realisasi penanama model 	ıı .		
10. Pembinaan aparatu penanaman modal tingka provinsi serb kabupaten/kota	nt .		
11. Pembinean penanama model PMA dan PMDN	n		
 Fersedianya data dar informasi perisinan dan nor peizinan provinsi 			

m) Repemudaan dan Dichrago (Bobot Oruson : 2%)

No	IKK Output	Hall Outcome	Rumus	Pobet
L	Jumlah pemuda yang mencaput pelatihan kewisunsahaan Jumlah pemuda yang mencaput bantuan kewitansahaan Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kade pengembangan kepenumpunan, kepeculian, kesukarelawanan dan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jumah pemuda (16-39 tahun) yang berwitausaha di provinsi	3976
20.	kepeloporan pemuda 1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan zang mendapat pelathan manajemen organisasi kepemudaan		Jumiah pemuda (16-33 tahun) 19 merjadi anggata aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi susial kemaspa ukatan di provinsi x 100%	38%

No	IKK Output	IKK Octoorie	Rumus	Robet
	100	N. T	jumlah pencuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	
å.	Jumish pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikun Jumish atlit yang dibina pada 3KO, PPLP dan FPLM Jumish penyakunggarsan esent OR prestesi tingkat daerah Jumish pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan Jumish organisasi kepramukaan (kwanta) yang difasilitasi dalam pengadampan organisasi		Jum ah peroietian medali pada event olahraga nasiotal dari internasional	3/354

n). Statistik (Bebot Urusan : 2%)

No	IKK Output	Hik Outcome	Runus	Bobot
t.	Tersetlanya buku profil doerah Jumish survey statistik sektural yang dibasukan Jumish kompilesi statistik sektural yang dilakukan	data statistik dadam	jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perercanaan pembangunan daerdi x 150% jumlah OPD	30%
9.	sektorst yang mendapat rekomendasi BFS 5. Jumlah kompilesi statistik	stotistik dalom melskukan esalusai pendanguran dae ah	dumlah OPO yang menggunakan data siatistik dalam melakukan evaluosi pembongunun daeroh 	30%

o) Persondian (Bobot Unusan : 2%)

do	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
t.	1. Persentase tegjatan strategis pang telah diamankan melauti kegjatan pengamanan sinyal dibanding benyaknya jumlah kegjatan strategis yang harus diamankan 2. Persentase sistem elektronik pang telah menerapkan prinsipasistem manajemen yang telah menerapkan prinsipal manajemen, keamanan intermasi (SWRI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah. 3. Persentuse sistem elektronik yang ada pada disudit dengan elektronik/esset mitomasi yang telah diaudit dengan	informasi pemerintah	Jumah nilai per area keamaran informasa	130%

No IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Pobst
tesiko kategori tendah 4. Persentase titik yang diamankan dibending dengan juntah sentuh titik pada pemerin (P.IKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pala hubungan komunikasi sand:			

pj. Kebudawan jidobot Urusan : 2%(

No	BCK Output	IKK Outcome	Rumus	Thisbut
2	Juniah obyek penajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisesi), pengemanan pengliharaan, penyelamatan dari publikasi). Juniah obyek penajuan kebudayaan yang dikembangkan		Juniah cegar budaya yang ntlestori.com = 100% Juniah cegar budaya yang ditetopi.com	130%

ło	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Hobet.
	(penyebarkasan, pengkajian, penayaan seberapaman)			
3	Jumiah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfastkan (membangun karakter bangsa,maningkarkan ketahanan hudaya,dan meningkatkan kesejahtenan meswarakat)			
1	Juniah SDM, lembaga dan prarata yang dibina (peningkatan kompetersi, standarisasi dan sertifikasi, serta praingkatan kapasitas tata keloloi			
- 5	Register cagar badaya (pencarlaran, pengjasian, penetapan, penestatan,			

lo.	IKK Output	IKK Octeome	Rumus	Pobet
	penghapusan) b. Perindungan cagar bidaya			
	provinci (penyelamatan, zenasi, pemeliharaan dan pemugaran			
	 Layanan perijaban merabawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data. 			
8	Provinsi (penelitian, resitalisasi, adaptasi]			
	Pemenfactan cagar budaya Provinsi [dalam hai agama, sestal, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan panwisataj			

NKK Output	IKK Octoone	Rumus	Hobet.
10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangaa dan pemanhantan kole csi museum 11. Peningkatan akacs museum dan pelaksancan kegiatan museum penjelaksancan kegiatan museum pengelolaan sarana dan pengelolaan kacama dan pengelolaan kacama dan pengelolaan kacama dan pengelolaan kacama dan pengenbangan dan pengembangan dan pengem	TKK DE TOOLDE	Rimis	Robes

No	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Robet
	14. Pembentukan tin, ahli cagar budata provinsi			
	15. Pusilitas sertifikasi tim onli osgar budayo			
	16. Pometasut sein, cagar budayat dan permuseuman			
	17. Peningsatan kompetensi sem cegar budaya dan permuscuman			
	18. Penyediaan sarana dan presarena pendaftaran cegar budaya dan permuseuman			
	19. Penyelenggataan keglatan niuseum yang melibatkan mesyarakat			

q) Perpustakaan (Sobot Urusan : 299

No	Jak Output	DCK Outcome	Rumus	∃obet
1-	t. Rasio keremukupan koleksi perpustaksan dengan penduduk	Niioi tingkat kegemanan 		5 0%
	Persentare zemontantor. perpustakann oleh, masyanaket.			
	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengar, penduduk			
	Persentake perpustakaan sesual standar nasional perpustakaan			
	 Jumlah penasyarakatan gemar membaca di masyarahat 			
	a. studah KUKK Deceb yang Efilimpus			
	7. Jumlah judul yang			

No	RR Output	IKK Streeme	Rumus	Bolont
	trecantum dalam katalog induk Dasirah 8. Jumlah perpustakkan yang bergebung dalam katalog induk dasirah 9. Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Doerah 1. Jumlah neskah kuno yang ninkunsal/dalih media (digitalisasi)/terdattar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dalih hahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis utasuhan yang tersin pandan/atau terdalar yang ada di wilayahnya (bem)	Indoks Pembengunan Jiterasi Masyarckat	laikks Pembanganan Literasi Masyumbot	30%

r) Kearsapan (Bobot Urusan : 2%)

No	BKK Output	ECK (Juneome	Rumus	Pobot
	persentase arsip aktif yang telah di matka i daftar arsip persentase ansip in aktif yang telah dibuatkan dettar arsip Persentase arsip sinda yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Persentase jumlah arsip yang dimustakkan dalam SEN melah distrik	Pingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntakilitas kinerja, alat hukti yang sah dan pertanggungjawahan naskanah Pasal 10 dan Pasal 29 Undang- Undang Namer 13 Pahun 2009 tentang Kearsipan	T = (c + 1 - s + J ₁ /-1) T = tingket keterseeinan ersip a persentase ersip aktif yg teiah dibuarian daftar arsip i = persentase arsip insktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarand bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIRN melalui JIKN	30%
	Premendan arsip yang sesuai NSEK Perindungan dan penyelamatan arsip olahat bencana yang sesuai NSEK Onyekanatan arsip	kcutuhan aran sebagai bahan pertanggungjiwahan setiap sajek kenidupan	T = fm + 5 + g = a + c + i]/6 T = tingket keberadaan can keutuhan orsip sebagai bahan pertanggingjawahan m = tingkat kesesucan kegistan	30%

No 1KK Output	16K Girreome	Runnes	Hobet
perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarian dan pemelaman daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4. Ausemifikasi arah statis dan arah hasil alih media yang dikelola nieh tembaga kesusipan provinsi yang	kepetingan negara, pemermitahan, peleyanan publik dan kesejahtersen rakyat	perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSFK g = tingkat kesesunian kegiatan penyelamatan arsip perengkat daerah provinsi yang digubung dan/atau dibubarkan can	
sesuai NSPE. 8. Peneurian arsip statis yang pengelolaaranya menjadi kewenangan daerah prosinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPE. b. Penerbitan zin penggunaan arsip yang berkisa tertutup		pemekaran daerah kabupaten/tota dengan NSPK a - dingkat kesebugian kegiatan arren ikasi arsip staris dan arsip hasil alih media dengan NSPK c - tingkat kesebuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I - tingkat kesebuaian kegiatan pencibitan izin penggunaan arsip	

No	IKK Grapad	16K Girreome	Rumes	Pobet
	yang disingan di lembaga kecasipan daerah provinsi yang sesani NSPs		yang birsifat tertutup dengan NGCK	

Ucusan Pithan

a) Kelautan Perikanan (Sobot Urusan : 2%)

dis.	IKs Quipui	JKK Storgoom	Frances	Probad
2.	Jumiah laut pedalaman territorial dan perairan kepulanan yang terkelola sumber dayo ikaninye (wpp) Jumiah ishi usaha perikanan tangkap untuk kupia perikanan berukuran 5 – 33 ort Pedanan yang memiliki standar operasional	Perikanan (Fangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/Kata di wilayah provinsi (saunber data: one data	Jumlah fotal Produksi Perisanan ffangkap dan Budidayai dari seluruh kabupaten/kota di winyah provinsi isumber deto: one data KKP)	50%

No	Ils s Output	16K Girreome	Rumes	Hobet.
	4. Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kopul pengangkut izin dengan ukunan diatas 5-80 GT 5. Jumlah kapal yang terdadar 6. Jumlah izin usaha perikanan di adang pembudidayaan kan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam t provinsi yang diterbitkan			
2.	Persentase luas wilayah laut dan pessir yang dikelola sesuai dengan peratuman perundangan yang berlaku Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulan-	terbadap ketentuan peraturan perundangan		30%

No.	likk Output	IKK Gurrome	Rumes	Hobet
	pulan kecil yang dikelola 3. Jumlah unit kapal perikanan (10 3007) yang dipenksa kepatahannya terhadap kecantuan peraturan peraturan perandangan yang bertaka. 1. Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai tein usaha perikanan (IUP) proviosi dan kat/kota vanz dipenksa kepatuhannya terhadap kecatuhannya terhadap kecatuhannya peraturan perundangan 5. Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil penikanan provinsi yang mempunyai tah usaha penikanan provinsi yang dipenksa kepatuhannya termalangan		e it jumlah pelaku usaha KP yang paruh sat jumlah sampet pelaku usaha KP yang diperiksa it jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP nsaha KP	

No.	likk Output	1KK Gurrome	Rumus	Hobet.
40	terbaiap peraturan peraturan perandangan yang berlaku. b. Jumlah pemegang asm pemantsatan ruang aur di bawah 12 mil laut (dirac minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terbadap kerentuan perandangan yang berlaku 7. Jumlah 20KMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SD-P 8. Jumlah isin usaha pengabahan hasil peritaman limas daerah kat/kata dalam i daerah kat/kata dalam i daerah provinsi yang diperhikan	NAS ALL TEMPE	Runts	PODIAGE

b) Pariwisata (Bobas Drusan : 3%)

No	HAC Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
1.	Jurilak entitas pengelohan destinast Jurilah kelengkapan infrastruktur dasar, izsiitas umme, dan izsiitas		Jumaii wisatawan tahun n- Jumiah wisatawan tahun n-1)	25%
2.	pariwisata 3. Jumlah milo: realisasi investesi di bideng pariwisata di tingkat provinsi	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	alumlah wisetawan tahur n-1)	20%
λ.	Juniah investesi per sextor usaha di bidang pariwisata Juniah tanda daliar usaha	Cingkat Indian akomodasi	Jumlah kamar yang terjaal 	25%
4.	pariwisata per sub jenis usaha di provinsi sata-rata lema tinggel visahawan manonengala /- vata rata tinggel wisatawan pussatara tingkat hunian	Kontribus: sektor pariwisa.a ierhadap PLRB harga berlaka	Kontribusi sektor parivisata teologiap PDRB harga berlaku	25%

о КК Опри	16K Gurrome	Rumes	Pobet
akomodasi 9. Jumlah wisotawan monomegara per sebangsaan 9. Jumlah perjalaman wisatawan nusuntawa nusuntawa nusuntawa daerah yang terlaksana di dais minegeri yang aikauti provinsi 12. Jumlah ndustri pariwisata daerah yang berpartistpasi pada eyen promosi pariwisata di daian negeri yang akana di daian negeri taha eyen promosi pariwisata di daian negeri 13. Fersentase tenaga kerja di selator panwisata yang diserutikasi	1555 3216 14 7446	77.00.000	Estable

No.	IKK Ourgin	1KK Gurrome	Rumes	Hobet.
	14. Persentase SDM peseria pembekahan seater cepariwisahaan 15. Jumlah kilosi yeng memperoleh pemberdayaan masyarekat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			

c) Pertanian (Bobot Urusan : 3%)

No		IKK Omput	IKK Gurrome	Rumus	Hobot
1.	2.	Jumleh Sarana dan prosona persutian yang diberlian Jumleh penerbitan serbikasi dan pengawasan benih	Produktivitas pertanian per haktar per tahun	Juminh produkst pertonian pangat per haktar per tahun x 190% luss panan	3054
2.	20 4	anaman horikultura Dokumen penguwasan benih yang beredar Prasarana pertanian yang digunakan		Jumish kejadian penyakir/kasua tahun berjakan (t) - jumish Jumish kejadian penyakit/kasustahun berjakan (t) - jumish kejadian/kasus	5054

No	ТКК Оптрит	16K Our come	Rumes	Hobet.
No	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu penaman Lues awal panggudalian dan penanggulangan bencana Penerbitah isin usaha penaman Persentase serana pertanian yang digunakan Persentase basilitasi	16K (tr come	Pomes penyakit hewan memilar tahun sebelumnya (t-1) x 190% Jumish kejadian/basus penyakit hewan menuke tahun sebelumnya (t-1)	Pohet
	penenggulangan bencana 10. Persentase jumlah usulan usaha pertanjan			

d) Kehmanan (Isobot Urusan : 2%)

No	Bik Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	Dokumen penataan hutan wikyah kPH Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panang dan jangka pendak	Peningsatan akses kepal kepada mesyorakat dalam pengelakaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diterikan okses legal 	3376
2. d. 4.	. Luas lahan kritis yang direhabilitasi . Luas krisakarar Pulan di	hotan satalom	Jumlah hutan yang rusak 	3354
	hutan lindung den hutan produksi Pehurunan luas gangguan kawasan hutan melalul aperasi pengananan hutan filkegal logging dan perambahan) Jumbah husil izin usaha industri primer hasil lintun kayu dengan kapasitas isin	laits yang dischahilitasi	Loss laban kritis di prozinsi yang direhabilitasi (los) 	201954

5:000m3 per rahun yang sktif

- Transabenga dokumon remeans pengubikan nukur
- Penitherrayaan masyarakan di doorah pasyangga
- 9. Domnliben ek-sisten jada Tahua
- 10. Menununuwa gangguan kewasan Tahura
- 11. dumbh ketersedban pray dali kelintanan
- 12 dumish serena den prasarsna begratan penyahihan
- 15 Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelutiban.
- 14 Totaili teksi legja an perungsahan kayasitas usana peda - Johnnysk - Johnnahan

scaled 15. terusunnya rancana pongololaan BAS lintas dacrah kabupaten/kola dolom t provins	
16. Trabentuknya kamin kumunikasi DAS yang mendukung kecerpaduan limas sektor	

e) - Energi Sumber Dova Mineral (Isobot Urusan : 3%)

No	HEE Cutput	JKK Outcome	Rumus	Bobet
1.	Perda/Pengub terkait zoussi kawasan konserwasi air tanah dalam daerah provinsi Pris konservasi air tanah	Cambang Sesuai Kewenangan Provinsi	sesuci kewenangan Provinsi yang	30%
2.	dahan itaerah provinsi 3. Perda/Pergub terkal, tah penggalian, pemakaian dan izin pengusahsan air tanah		jumkér tosáka tunhang szezzá kowenzágan Provinst Jumlah desa yang tersül listrik 	,70%

No.	IKX Gutpot	16K (turnome	Rumes	Robet
4.	dalam area provinsi Perda/Pergub terkait izia penggalian, pemakaian dan izin pengusahkan air tanah dalam area provinsi		Juniah desa	
5.				
Ď.	Perds/Pergub terksit dengan tata ruang wilayah KAWRIA dalam darrah provinsi			
7.	Perda/Pergub terkait dengan peristran mineral bukan logan dan batuan dalam daerah provinsi			
8.	Perda/Pergub tericalt IOUP			
9.	Perdu/Pergub terbait penerapan hanga papakan minoral bukan legam dan			

No.	1K3 Gutput	16K Orrnome	Rumus	Hobet
13 11 12	batuan sisuai UU 28/2009 Izin pemantaatan langsung yong diterhitkan Jumian penerbitan SKT pantes buhi dalam t tahun SK izin usaha niaga bahan bakar nabati Perda/Perguo terkait usaha			
	penyediaan tenaga listrik dalam daeruh provinsi flata care, penerbitan, pembinaan dan pengawasan)			
11.	Peneriihan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam damah provinsi			
15	Perda/Perguio terkait penetapan balif terang, listtik tenaga bistik pemegang san yang ditatapkan oleh			

No.	IE & Gutpot	16K Gureome	Rumus	Pohet
	pemerintah daeiah provinsi 15 Surat Persetujuan Gubamur terlmit marga juni teraga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dan sewa jaringan belevihan tenaga listrik dari pemegang isin yang diterapkan oleh pemerintah daerat provinsi 17 Penerbuan isin usuha jusa perunjang tenaga Istrik pagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahannya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengajian di bidang teraga istrik tegangan tendah			

No. IKA Gutput	IKK Gureome	Rumus	Hobet.
19. Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis hegi masyarakat tidak mampu			

0. Pendagangan (Bulast Urusan . 3%)

No	IKX Cutput	ЖК Оплоше		Rames	Pobot
1.	1. Fersentase peiaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang 2. Fersentase pelaku usaha yang memperoleh hasilitas pengembangan produk 3. Fersentase pelaku usaha yang memperoleh pelaku usaha yang memperoleh pelaku		n'iai	Wiai tesper non migas tahun berjalan – nilai eksper non migas tahun sebehimnya ————————————————————————————————————	14%

No:	IK & Gutpot	16K (turnome	Rumes	Pohet.
2.	4. Fersmuse pelaku usaha yang men adi ekspertir baru 5. Jumlah keginan yang dimeksudkan untuk untungkataan citra produk eksper 1. Jumlah penanganan prangalam kansamen 2. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukas.	Рагвандыга районуулын рануядыга колзулага	Jumlah pergahasa kansumen yang ditangan dan BPSK-sesai dengan ketentuan yang teriaku dalam tahun berjalan kansumen yang diterimadalam tahun berjalan	HSa
3.	cumlal, komodid potensial yang dipantau	Persentase komedid potensial yang statai dengan ketentuan	Juniah sampel yang sesual ketentuan x 100%	14%

No.	HCC Cutput	16K Gurcome	Rumes	- Robet
2	. Todeks Kinerja DPSMB	berliku	Jumlah sampel yang diaji dalam satu tahun	
4. 1. 2 3. 4	Beralkohol (MB) bebas bea vang diterhitkan Persentase rekomendasi SIUP MB langi Distributor yang diterbilkan	Vertib Dagna	Jumlah peluku usaha yang memiliki SEJP MB TBB 	1456

No:	IEX Cutput	10K (turnome	Rumes	Hobet
5,	Pengawasan pupuk dan pentiskia terhadap pengadaan penyahiran dan penggunaan pupuk bersubsid, dan pestisida pertahun di provinsi	Persentase kineria realizas, pupuk	Realisasi x 100% RDKK	14%
G.	 dumba'ı barang bereder yang diawasi 	Persentasebanang bereita yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan beruncang undangan	Jumbh banang bergian yang diseasi sepai dengan keterinan perundang-undangan x 102% Jumbh barang peredar yang diseasi	HS
7	Deroperasinya pusat distribusa yang melayani wilayah provinsi Tersedianya banganan pusat distribusi Telah ditetapkannya badan menya pengeloja pusat	Persentase stabilitas dan pundah ketarsedkem hanga barang kebutuhan poksik	$KVpt = \frac{sn}{r} \times 100\%$ $KVpt = Koefisien Variasi harga basang kechutuhan pulsuk antan waktu. Sn = Standor descusi harga ratarata, prowinsi selama bulan$	14%

16K Orricome	Rumes	Pobet
16K Gurrome	Januari s.d Describer P = reta-rata harga provinci burang kebutuhan pokak selama bulan Januari s.d Desember	Pohet
	ICK (turnome	Januari s.d Desgraber 1° - rata-rata harga provins) berang kebutuhan pokak selama

g) Perindustrian (Boliot Urusan : 3%)

No	HCC Gutput	IKK Sutcome	Rumus	Pobot
1,		Periambahan jumlah Indusut besar di provinsi	(Jumlah Industri besar tahun n- Jumlah industri besar tahun n- 1)	1/55
3.	Prasantes trasdessikannya dokumen RPP sempei dengan ditetapkannya menjadi perda	Persentase percapaian assasa pembangunan tudustri termasuk tudustri indiastri per kangunan indiastri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIF		17%
3. 1	Prosentes jumla i kin usaha industri (191) basar yang diterbitkan	Persentase jumlah basil pententanan dan pengawasan dengan jumlah tau Osaha Industri (I.4) Besar yang	dumlah izi i yang dipantan dan dianahsis dalam laparan hasil yemeritauan ———————————————————————————————————	17%

No	IKA Gutpot	lick (ar rome	Rumus	Hobet
4. 3	perinasan industri (PUI) bagi industri besar yang diterbilkan	pemantanan dan pengawasan dengan jamlah lain Perhasan holostri (IPM) bagi	Jumlah isin yang dipantau dan dianatisis dalam laporan basil pemantauan ———————————————————————————————————	17%
5.		Persentase jumlah hasil persamatum dan pengawasan dengan jumlah isin Usaha Kawasan bahastri (IUEI) dan Izin Perhasan Kawasan Industri (IPEI)	Jumlah izin yang dipantau dan dianahsis dalam laporan hasil punantauan ———————————————————————————————————	17%

No	HCC Cortpor	1KK (turnome	Rumes	Robet
6.	Persentese data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kebupaten/kota yang masuk dalam Sli Nas terbadap total pepelasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kets	industri serara bugkap	Terandianya nfurnasi industri dengan batas waktu 0 6 la lan Tarsadianya nferorasi industri dengan batas waktu 7-12 batan Informasi produksi dan kapasitas produksi Informasi bahan baku dan bahan penolong Informasi tahan Lakan/ energy Informasi teranga kerja Informasi investasi	175a

h) Transmigross (Bohot Urusan : 196)

No	HCC Gutput	IKK Outcome	Rumus	Pobet
2. 0.	transmigrasi yang dibashitasi peneraparnya Jumkah satuan yenrukiman transmigrasi yang dibashitasi pembangunannya			

Fungsi Perunjang Trasar Paucrintshan

a) Pereceanasa dan Keuangan (Bobet Urusan : 30%)

No	tKx Cutput	IKK Juncome	Rumus	Bobot
1.			Jumlah belanjo pegawai diluar guru dan tenaga kesebatan x 100 % Jumlah APED	16.7%

No.	IKA Gritpot	IKK (trreome	Runnes	Pohet
2.		Rusio PAD	Jumlah PAE	16.7%
3,		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expranditures)	pemerintaiten - ux nafer	16.7%
d.		Opini Laporen Kenangan	Opini Laporan Kenangan	16.7%
5.		Moturitas Sistem Pengendalian Intern Percentitah (SPIP)	Tingkat Marurkos SPIP (beham dinital (0)/level 1/level 2/level 3) berdesorton Laperon Hasil Quality Assurance (QA) yang dikebuarkan oleh BPKP	1667%
6.		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan lutem Penerintah (APIP)	Tingled Knalibe APIP (action dhills) (0)/level 1/level 2/lezel 3) burdessakan baparan Hasif Quality Assurance (QA) yang	16.7%

No.	HCC Gritport	TKK Girreome	Rumus	Robet
			diceluarkan oleh BPKP	

i) Pengadaan (Robet Unitsen : 10%)

No	HEX Curput	JKK Ou nome	Runus	Bobot
1.		proyek konstruksi yang dibawa ke sahun	jumba'i kontrak inirastruktur dengan nikii bezor yang pertu pembanganan dalam 3 kuartal yang ditambatangani pada kuartal pertaras tahun n	33%
2.		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metade kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetir f	33%

No.	HCC Corpor	16K (turnome	Rumes	Pohet
а.		Rasio tilai belarga yang dilakukan melalut pengadan:	Jumlah nilai bekarja kingsung yang melahti pengadaan X 193%	33%
			total belanja langsung	

j) Kepegawalan (Bobot Urusan : 20%)

No	Hex Corpor	JKK Guarane	Funts	Perhad
1.		Fendid kan Tinggi dan Menagah/Dasar 194 (FNS tidak termasuk	Х 100%	3356
2.		Rasio pogawai Fungsional (%) (PNS tiduk termanuk guru dan tenaga kesebatan)	Jumlah pegawai PSS fungsional jdi uar guru dan tenaga kesehatan)	33%

No	IKA Cutput	IKK Stricome	Rumus	Pohet
з.		Fungsional herserfilikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru	guru dan tenaga kesebatan) Jumlah pegawai Fungsikusal yang memiliki sertilikat kempetersi	33%

kj. Manajemen Keuangan (Bohot Urusan : 20%).

No	IKK Cutyut	IKK Ou come	Rumus	Dobot
1.		Budget enscution: Devical realisasi belanjo terhadap belanja total dalam APED	Nilai obsolut dari Total belanja dalam realisasi 	25%
2.		Resenue mobilization: Deciasi redisasi PAC; fertisatop anggaran PAD dalam APBD	Nilai shaohu dari Total PAD: dalam realisasi	2564

No.	HCC Cutput	1KK (turnome	Rumes	Bobet
3.		Assets management	1. Apaicah izla daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apaicah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apaicah ada proses Inventarisasi asset tahuaan? (Ya/Tidak) 4.paicah nilai asset terrantum dalam izporan anggaran? (Ya/Tidak)	25%
4.		terhadap total belanja	Nilai realissoi Sit.PA	25%

l) Transporansi don Partisiposi Publik (Bohot Urusan : 20%)

No	HCC Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
1.		sumber anya yang tersedia untuk pelayanan (Information	Delan e enggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di mehane Peruta	30%
2.			Jumbih dokumen yang dipubakasikan di <i>websit</i> e Penda 	50%

rupatenykota

Urusan Pemeriatahan Wajib Berkaitan Priayanan Dasar

a) Pendidikan (Bobot Urusan : 5%)

No this Cutput	ISK Ou come	Runus	Bobet
1. Jumlah Sahian Bendidikan Anak Usia. Dini Terokreditasi 2. Jumlah peserta didik FAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Femerintah Doerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerims pembebasan bisya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD	wanga пераца usia 5-6	Jumlah anek usia 5-6 tahun yang sulah tamat atau sedang belajar di setuan PAUD	2564

No.	IK Corpor	16K (tirreome	Rumes	Robet
	yang mendiki ijasah			
	diploma empat (D-IV) atau			
	sarjana (S1) bidang			
	pendidikan anak usia dini,			
	kependidikan lain atau			
	psikologi dan sertifikat			
	profesi gunu pendidikan			
	anak usia dini			
	7. Jumlah kepala sekolah			
	PACD yang mendiki ijazah			
	D-IV atau S1, sertifikat			
	pendidik dan surat tanda			
	tamat penditilban dan			
	pelatikan calon sepala			
	sakolah untuk PAUD formal			
	atau sertifikat pendidikan			
	dan pelatihan kepala satuan			
	PALD non-formal dari			
	lembaga pemerintah yang			

No.	IKX Cutput	16K Giricome	Rumus	Hobet
2. 1.	berweising Jumbil 8D dan 8MP Negeri Terakreditasi Jumbil peserta didik jenjang sekulah dasar yang menerima pertengkapan dasar paserta didik dari	werga negata nala 7-12 tahun yang	Jumlah anak usia 7 12 tahun yang andah tamat atau sedang bekajar di sekolah dasar	25%
3. 3,	Penrointah Danah Juntah peserta didik jenjong sekolot menengah pertama yang menerima pertangkapan dasai pracita didik dari Femerintah Daerah Juntah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pendahasan bisya pendahasan	warga negara tisla 13- 15. tahun yang lempartisipasi dalam	10000	25%
5.				

No.	IK Couput	16K (tirreome	Rumus	Robet
	jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan, biaya pendidikan			
6.	Jumbit kebutuhan minimat pendidik pada jenjung sakolah dasar			
7,	Jumlan sebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah merengah pertama			
8.	Jumbin pendidik pode jenjang sekulah dasar			
19,	Jumlan pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			
13	jumlah kebutuhan minimal teraga kependidikan pada jenjang sekalah dasar			
11	jumlah ketutuhan minimal			

No.	IKK Gutput	16K (turnome	Rumes	Hobet
	teraga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			
12	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekalah dasar			
13				
14	Jumish pendidik peda- jenjang sekolah dasar yang memilihi ijasah diploma empat (D-17) atau sarjana (S1) dan serifikat pendidik			
15	Jumbin pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijasah diploma empat (E IV) aten sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			

No	IK Contput	16K (tirreome	Rumus	Hobet
15	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki tjazah DIV otau 81, sertifikat pendidik dan surat tanda temai pendidikan dan pelatihan			
17	calon kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijarah D-IV otau 81, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dalah sekolah			
19				

No:	IK Couput	16K Giricome	Rumes	Hobet
	19. Jumlah tenaga penunjang lalanya pada kenjang sekolah mepengah pertama yang memiliki ijasah SMA/sederaja.			
4.	Jumish satuan pendidikan kesetia satu terakiyilitasi	Cingket partisipesi vanga negara usis 7- 8	Jumish anak usia 7-18 tahun yang behun menyebasikan	25%
	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetanaan yang menerima mertengkapan dasar peserta didik dari Pengenash Daerah	menyeksaikan pendidikan dasar dan menengah yang	pendicikan dasar dan unanagah yang sudah tamat atau sedang belarar di pendirtikan kesetaraan 	
	Jumish peserts didik ppendidikun besetaraan vang menerims pembebasan bisya pendidikan	pendid kan kesetaraan	yang belum menyelesalkan pendidikan dasar dan menengah pada pinyinsi yang bersangkutan	
	Joseph Sebetahan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			

No.	IK & Gutpot	16K (turnome	Rumes	Hobet.
5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			
fi.	domiair pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki Ijazah diploma empat (E-IV) atau sarjana (S1)			
7.	Jumlah kepala sekriah pada jenjang sekolah dasar yang memilihi tjazan D-IV atau 31, sertrikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan caku kepala sekolah			
8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memilik ijasah D-IV atan SI			

bj | Kesebatan (Bohot Urusan : 0%)

No	HCC Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1,	Jumiah RS Rujukan kabupaten/kata yang memenuhi sarana, presarana dala alah kesebatan [SPA] sesuai standar	Kasio daya tampung ES terbadap Jumlah Penduduk	Jumish daya tampung rumah sakt rujukan 	7'96
2.	dumlal. 188 dibina dan dipersiapkan aku ditasinya	Persentase R8 Rajukan Pingkat kebupaten/kota yang terakrecitasi	Jumbih 38 Rujukan yang terakurilias 	7%
3.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Percentase ila hamil mandacatasm pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumbh Bu hamil yang mendapatkan pelaganan kesehatan ** 100 % Jumbh ibu bamil di kabupaten/sata	796

No:	IKK Curput	16K Our come	Rumes	Pobet
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan perselinan sesua, stigular	Persentase ibu bersalin menca satsan peleyunan persalinen	Jundah du bersalin yang mendapatkan pelayanan persatnan x 100 % Jundah du bersalin di kabupaten/zota	7%
5.	Jumbal dukungan kejistik kesebatan yang tersedia Jumbah SDM kesebatan untuk peleyanan neonatal esensial sesusi standar	Persentase layi 'wa a lahir mendapetkan pelayanan kesehatan bayi haru lahir	Jumbih biyi bana bihi yang munispatkan biyansu kesebetan sesua, standar ** 100% Jumbih biyi bare, lahu di kabiqsicin/kota	7%
ti.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedaa Jumlah SDM kesehatan untuk peloyanan kesehatan tahta sesual standar	Cakupan pelayanan kesehatan baltu sesuai sisua s	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 	7%;

Na:	HCC Cutput	16K Gurrome	Rumes	Hobet.
7.	Junilah dukungan logistik kesehatan yang tersodia Junilah SDM kesehatan tentuk pelayanan kesehatan susak usta pendidikan dasar sesturi stender	Persentase ansk usia pendid.kan dasar yang mendanatkan peleyanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 	796
ß.	Josefal dekungen kejistik kesebatan yang tersadia Jumlah SDM kesebatan untuk pelevanan kesebatan sesuai standar	Persentase oracig usia 15-29 tahun munda setkan skrining kesehatan sesuni standa:	Jumlah mang usia .5-52 tahun yang muniapatkan skubiling kesebatan sesuai standa; × 100 % Jumlah orang usia 15-50 tahun di kebupaten/kota	7%
9.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedua Jumlah SDM kesehatan trutuk pelayanan kesehatan sesual standar	Persentace warga negara usia CO cihun ke atas mendapatkan skrining kesetiatan sesuni suandar	Jumbh warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan stahung keselintan sestal standar	7%)

No.	IK Cutput	16K Gurrome	Rumes	Pohet
10.	Junilah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Junilah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan peleyanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita bipertonsi yang mendapatkan pelapanan kesehatan sesum stannar x 100 % Jumlah penderita bipertensi di kabupawa/zota	7%
11.	Jumbah dukungan bigistik kesebatan yang tersulia Jumbah SDM kesebatan untuk peleyanan kesebatan sesusi standar	Persontase parakaita DM yang membapatean pelayanan keseladan sesuni standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesebatan sesuai standa; x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/sota	7%
12.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah SIM te sehatan rutuk pelayanan keselutan sesual standar	Persentase O.K.J berat yang mendapatkan pelayanan kesebatan juwa sesuai standar	Jumish pendenta DDSJ yang mendapatian pelayanan kesahatan sesuai stanas:	7%

No:	IKA Gritput	16K Gir rome	Rumes	Hobet
13.	Junilah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Junilah SDM kesehatan untuk prisyanan kesehatan sesuai standar	Persontase mang terduga TDC mencapataan pelayanan TSC sesual standa:	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan liesehatan sesuai stannar x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupatan/kota	796
1-1.	Jumbah dukungan kejistik kesebatan yang tersulia Jumbah SDM kesebatan untuk pelevanan kesebatan sesusi standar	Persentase mang dengan nesika trainfeksi HIV mendapatkan peleyonan deteksi dini HIV sesusi standar	Jumlah unang dengan resiko teri deksi FIV yang mendapatkan peksyanan deteksi dini HIV sestadi atandar	7%

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Staang (Bobot Urusan : 6%)

No	IKX Output	DKK Outcome	Rands	Dobot
1,		permulaman rawan banjir yang tertindungi oleh infrastruktur pengeretalian banjir di W3 Kewanangan Kab/Kota	rawan banjir yong terlindungi oleh intrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kah/Kota (ha)	10%
2.	abnai erosi dan akresi di W8 kewensugan kabupaten/kota (HA)	permikusur seperjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wa	infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupater/ sota (m)	10%

П	o. Rendama Tera Hengaruran etr		sepanjang pantal rawan abrasi di
	dan tata pantairan/ba		W5 Kewenancan kabupatan/kota
	przegyfictora 1911 Afr. 900		(m)
	Rewonanger kal, upater/kata		
	6. Bermana ekntis tara		
	progatilizan ali for tota		
	pragainar/recessos		
	progelidase autobre days aid		
	kewengupas kabupatenyikota.		
	 Cora presentina den sentina 		
	penganian pantai dan sitogal		
	mil's permerictal bah/seta		
o.	Persentase panjang jaringan	Rasio mas dacrah Irigasi	Tuas Lisasi bivonencan 10%
"			
	irigasi pirmer koncisi bark	beweitengan	kahupaten/kota yang dilayani
	2. Persentes penjangjeringen		oleh Jaringan iligasi yang
	irigasi sekundar dalam		dibangan (ha), ditingkatkan (ha),
	kondusa baila	msoal	direhabilitori (20) disperasi dola
	3. Persemase ponjang Jaringan		pelifoara (ha) di tahun ekstering
	irigasi tersier dalam kondist		×100 %
	haik		lmas duerah irigusi bewerungan kahupaten/kota

Jumilah Jumikh Immiliatif masyarakat Benerapan dokumen MSFAM Persentase . kabupaten/kata (Alac/Tidak) rumah tangga yang yang rumah tangga yang 9. Lerana midan irtitetapkaranya i menylaparkan ili liakwee into daga (kani alaana terbeda), war Kale/Kota Galaciap sie mundie minum instalin 9PAM jamigan OMESTICATION. Mda/ licalą i melatai SPAM jamigan perjajaan dan bukan jamajan s. Jumlah R. MD. dan/stau perpipaan dan laikan perpipaan terlinding di calam - Kal-/Yota (jerings) — perpipaan salmal kalimpsto/Pota BPAM Palendongi terrechanggars (Aday Jidaki rumah dangga di seluruh Dumkhotat - proyekar - rumah 4. Juriah itan yang diberikan bahirpaten/Itoladı tangga kepada Badan Useha urtuk. kehripaten/kota tersebut. melaki kari. Noryelo gjarsan STAM a. Jumpi Кезјазила penyelenggaman SEAM dengale Pemeriotah Phaet Anni Terric Horabi Eta Leon Bern Jumiah inimah dengan alises J1096 unit progelahen setempe. unduk kegalan parkabbah pologounari dascu mer ggimakani SPATD S Primible ormali dengan akara Journal Tomaco young incombin-

pologoresi dassu
menggarnakan SPALD 8

2 Jumlah pumah dengan aksea
sandungan minad minak
kegadan puaksantan
petaganasa dasa
menggarnakan SPALDP

3 Jumlah pumah dengan aksea
mili pengdatean satengal
das cata pumlah rumah
dengan akses sambingan
minah umuk kegatah
pementihan pelayahan dasar
menggarakan 9040 6 8 dan

SPALLOR

	'	Jumlah turnah yang sudah				
		положива розвувания јазж				
		heartespare produce pros				
	×	dumlid, rumidi yang audier				
		menerbria pelavarian jusa				
		pengolahan limpini tinja				
	k.	dundal ini ah yang sidah				
		menerational perlayaman jaara				
		penyolahan ar huibah				
		domeshk				
	7	Minerya pedyedikana				
		programmin SPALLES below				
		deser				
	b	tunierja pergledozon				
		polayanon SPALD B aksos				
		Aman				
		Linerja pergodovan				
		pidaganan (90%) Di akara				
		anti				
	ı					
	1:1	Kinerja penyedisar unit				
		pergelshar satemps.				
	ш	binoga i porçeol alan il satzina				
		paggangkulan lompo. Giga				
	12.	Idherja penyedhaan				
		prosessine gangalahan				
		hoopen tinja				
	11	Kinoga poryodrawn				
		зышбиндай таниал wang				
		tersamorang ke (PAUD)				
	ν	Kliterya penyetilaan jasa				
		proyed itan hoogoe tinja				
6.	ι.	kaslo sangunan goding			Jumkh pemantatan IMB yang	10%
		(kecual) minish unggal			зерия региппикатора	
		tungal dan renadi dare.			x 100 %	
		scelerbona) yang biik Jungsi	Posic kopatulan	шз	Junikh IMB rang berlake.	
	2	Jumlah MB yang diberdaa				
	1	oleh Peniezinrah Kab/Kora				
		4alam schimekeisting				
	ı					

- ă. Келегаран Регалият (частан) tentang Bandenan/Golong (Ada/ Islak) 1. Periotecker Ecpetuser tarped/Wailada usolang Pic Abil Bengridon/Gorling (Ada/Tidak) 5. dombah bengunan gedung yang dilotapkan olon Birgard/Walibota umtulk di indringi dan di estatikan . gradice neorgased letters. A yang ditotapkan oloh Lugary/Waaliola usinik kepentingan strategis daktan provinci 7 Jordal Tengunan golong negata milik Dziezintan Kany Kota
- 8. Juniah hanguan gedung negara milik pansaintah hatroparen/keaa 29000 dioddiara/dirawa) 7. Jumish penjang palan dalam 💎 1986 I. Famjourg galen bendeserfrom yang ditotapkan Kopala kondial mantap toward dalam sk datas v 100136 kewendingan Kab/Pota Jumichtota, panjang jalan 2. Fanjung Jalan yang dilkingunkalnijerlen/kola: S. Panjang jombatan yang dibangan. 1 Fanjona jolan yong Tingkor kemanlopan dhingkatsan Jalan kabupaten/kota jatrii litur/hangsij 5 Fanjang jumbatan yang digasti/dilobo kan o Fanjona – jolan young dicelonation by direct a billion in c. Panjong Jembatan yong di Zoskilitesi

8. Fanjang pilan yang dipelihara ⁶ Fanjang jumbatan yang 1. Jumlah Peberham Temaga Б. Jumiah teraga isaga kansmitsi. 110% Abili konsemitsi et villeyan yang tenarin di wilayah. kalaupahan/kutakabu/kata sang dibuktikan g Jumbar kerja sectifica pela tili. iri enuga deng 1 konstralzu yang terlatuh di operator don teknis/analis x 1000% enliga i kabupalen/koa: JumishPetarunan tenaga 3 himlen redage krigle. paus perater/telensi/analisis di terserubkasi obil di valoran pasa perater/telensi/analisis di terserubkasi obil di valoran pasa perater/telensi/analisis gang mendiki sertifikar walayah Zobupaten/Lote. kalmipotin/kota z. Terselenggaranga Sistem komputansi hilomasi Pintina Jasa Ronstruksi Calapeer kobupaten/hoto yang aktif deogaic data termiuralchic

- o Tersedianya data dan informasi peterai pasar Jasar karahakan di wilayah kabupakar/kota umuk tahun herjalan sang becamubar dan APRO KabyKota
- n Terezzianya data dan mitormasi potensi pasar asa borstruksi el uniayan lodropaten/hom urmik tahun horjako yang bersumbar dan ACDN
- / Terseduaya data dan informasi potensi pospinjosa konstroksi oli wilayah kabupaten/kota munk tahun hopaba yang bersuluten dan pendouwan launga

- 8 Persedianya data dan indumesi pakat polonjason jasa kasamikan asami kasamakan dan selang dibaskanakan hoh badan naaha jasa karatraksi jasa kasamakatan kasamakatan kasamakatan
- Tersedianes, dalar dan pretif OPD sub-umsan jasa bersrinkst sahngaran/kara
- III Tasastianya data dan hidamasi pitauhan tenaga operator dan teknisi/analis karlamiksi di wilayah kalmapian/kata yang dilaksan kan amelin atau indah li serpasana dengan Lembaga Pelathan Katja (PEE) yang Pelathan Katja (PEE) yang

diregistrasi oleh inemeri yane membidangi jasa keristruksi, asenissa taraksi, penguruan tinggi daer Insonis: penierbirah tanniya.

- 11. Terestionya data dan informesi terge kurja kerja kerja kerja kerja kerja kerjangan data di engan gang dibu tilkan dengan sertifikan pelatuan operatur dan tiknisi/ melis
- 12 Torsedianya data dan milotinasi tenaga kerja karistriksi terlatih yang tersentifikasi constator/telatisi/media di ediayah keb/kara

- I.s. Tersedianya data dan indomesi bedan usada yang merebipatkan penderasah di wilayah kabupaten/kola
- 11. Tersexhanya data dati laformesi pemeruhan kemitan repremilisasan 1905 kadan reselas dan 1900 yang disebupa
- 15. Tersedianya data data informasi hasil pengcapasan keti daksi sodian jimizi sidat, klasulksei, leykhen deshe bentuk danyatan dudukusi danka dengan kagatan dasha jasa korstorksi yang dang Alexandagan jengasasannya
- Tri. Tersedlanya data dan indunesi Eustalesen korstruksi peda prosek yang magasti Ersedangser pengawasannya
- 17. Terestionya data dan informesi Tasil pengawasan ketelaksi anasan jusis, silan klasuksasi, basacan usaca, bentuk danyatsu kualifilibasi usaha dengan segmentasi pasan jasa kesistruksi yang menjadi. Besamangan pengawasannya
- 16. humlah tadan nsaha yang memiliki IPUKN di wilayah kab/kata
- 15 di mbh msaha renecesangan yang membha TDCP or whyah katajaran/kata

- 20. himlah hadan usaha yang memiliki IIMEN yang terliba. dalam projek di wilayan Rob/Bota
- 21. (fundal) hadari risaha yang mendaparkan pembirasa di wifayah Yah/Keta
- 23. demilsh piar ia arbeer концинен реглимация 100 К badan dana con TDDF yang disemijal
- 23 dembali pengarsasan torkai. katidakscaussan jonia, sifat. klastikasi. Invariati usatio, bentuk danyatan kualifikasi nasha dengar kegiatan nyaha jasa kia shi ka yang minijati kowanangan рендамаканануа
- 21.-in:miah Pecelolistan koustruksi pada proyok yang menyedi kewemangan рищемовишие
- 25. Humlah per⊚awasan terkar. kehdaksesuawa jenis, sibir, klasifikasi lavaten nsaha, lentrik danyatan sualifikasi usatas dengan seguientasi pasar jasa konstrniksi yang menjadi Iteatenangan реподавления пуж

kecelakaan konsuruksi

Jumkih bloyck vang nichjadl Peser provek vorst kowenougen pergawaarunya menjadi kewenungan yang reejadi berekabaan Jumbhiotal, moyel, yang menjadi,

коменениям ренувачаваннуя

d) Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 6%)

No	HCC Gutput	IKK Outcome	Rumus	Pobot
1.	1. Jumlah rumah yang berada pada cawesan rawan hencana dar rencana pensugsusunya. 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan alwa korban yang cumalnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah kerban bencana yang direnabilitasi sesual dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah kerban bencana yang dibangan kembali sesual dengan pencana aksi 6. Jumlah unit rumah kerban bencana aksi 6. Jumlah unit rumah kerban bencana yang dibangan	rehabilitori tumah layak huri bagi kerban bencaus	Juniah unit rumah kerban bencam yang ditangani padu bahun n	207.6

horu/relokasi sesuat dengan		
консания аймі		
7. Junilah (not dan lisasa		
round, www. yang akan		
menjadi tempat huggal		
someofara konten bencoria		
8. Jumlah RT KK dan Jiwa		
kratian termana yang		
terlosalitasi		
o. Jumlah, luatan dan lokasi		
penceda cyan laira 1		
2 I Jumioh rumou temaga	Fasilitosi pervedicon	Russen Tougge Penerima Area
penchima lavanon yang telah.	ramah lazak huni bagi	l'aulitasi Naggantian Hak Atas
mendapatkan lastivasi ganti	masyanalist tercempak	Penguascan Panah 4an/arau
karagisar sesa properti	rolokasi nomem	Bangunan (Rumah Tangga
budosadan ranona	personition	Durcring Subsidi Uang Seve. (
pemenunan SPM	kabupaten/kata	Ruman Tougga Penerima
2. Jumlah musih tangga		Pervediaon Rumah Layak Diani
penenma lognarat layanan		x 100 %
yang lahua membapatkan		dimilair titai muah tangga
2005 1300 L 00 00 00 00		man man tanjiin

lastikasi penggantian hal:	rentena reinizasi grogram
ates tanah dan/atau	Proprintaci Datash yang
hargman lerda-arkan	morroudii kadana parcina
кназаверлав подалі 8. Ж	pokovalau
3. Junilah munan tangga	p. 101 43043
procoma lorgiarar layanan procoma lorgiarar layanan	
herts-ordern concens	
penemen. 50M 1. Jumish Tuman tanaga	
penenma læglaren layanen	
yang telah mendapatkan	
pouvodisen romeh lavek	
hilin berdalahkan tengana	
personner M'M	
5 Jumlah roma'n tangga	
periorina layaceri garag	
heli m — mendaparkan	
percyedicana rumicha layada	
In the landersemble interesting	
ременират ВРМ	
5. Jumlah total Tussan (Hal	
jurgashan barah	
9. 1. Jumion Juasan (Haj Persentase In	owasan latas sawasan bermukanyan Zen
kawasan permukhaan permukiman	kumuh kumuh dibawah 10 na yang
Eumuir≺ 10 ffo dibewair 10 f	la (ii ditagau fla)
v Jumber und penngkalan kalinjaner/kiro	yang v 1000%
bualitas RPD1 ditangani	Licas zawawa permukhaan
v. Jumba i hasa (ba)	kumuli dibawah 10 ha
-constrained through the training the training the training traini	I
peranganan Intrasomkrit	
penanganan Intrasomkrui	
penanganan Tidrasemkriti Eswalsus Europi	jumlen Jumkh unt rumsh tidek lezak (20%)
penanganan Enfrasomkriti Eswalsu kumuh 4. 1. Jumlah rumah 41 ket/John Berizhrengaya	jumlen Jumkh unt rumsh odek lejak 1996 Bruneli Triri
peranganan Enfrasorikmin kawa sar kumuh 4. 1. Jumish cumah 41 ket/loon Berzhiengayo	runah 1. ii
peranganan Intrasemkrii Exwalsu kumuh 4. 1. Jumish cumah 4t ket/bota Berzhoutgaya 5. Jumish mii PKETLE mii PT.H (7 mali 1 mi x 100 %
peranganan Intrasemkeri kawa sar kumuh 1. Jumlah cumah 4t ket/loon Berzhoergayo 2. Jumlah cumah 1tak Javak Tidak tayak Heri 5. Jumlah cumah citak Javak Tidak tayak Heri tumu	Franch Trai i) ————— x 100 % Jundair —ai mit musda
peranganan Enfrasomkriti Eswalsu kultub 1. Jumlah rumah di kat/kuta Belizhrangaya 2. Jumlah mit PK ETLF mit BTLH (3. Jumlah mit BK ETLF di Kayak Ham	7 mali 1 mi x 100 %
peranganan Intrasemkrii: kwassukuncub 1. Jumlah cumah 41 ket/bota betzmengaya 2. Jumlah cumah ritak isvak Tidak isyak Hami tutu 4. Jumlah cumah wang udak	Franch Trai i) ————— x 100 % Jundair —ai mit musda
peranganan Intrasorikmin kawaksu kullub 1. Jumish zumah 4t ket/John Belizhesigaya 2. Jumish zumah 1thak Javak Tidak Layak Hom tullu 4. Jumish zumah zidak Isvak Tidak Layak Hom tullu 4. Jumish zumah wang tidak dibuah 5. Pasio romah Jan VK	Frinch Trai i) ————— x 100 % Jundair —ai mit muala
peranganan Intrasomkrum kawaksu kumuh 4. 1. Jumlah dumah 41 ket/John Berzmengaya 5. Jumlah umit PK ETLF umit PTLH (5. Jumlah umit PK ETLF unit PTLH (6. Jumlah umah ritak isyak Tidak isyak Humi lumu 4. Jumlah umah wang udak dibuah	Frinch Trai i) ————— x 100 % Jundair —ai mit muala

1.	Jumiah parumahan yang			Jumikh unit tuman yang sedang	2055
	terlasilitasi PSU			dibangun kalasiBesi PSC	
	Trindat mut crimab yang				
	audati dikosiitasi air mimur			Jumber unit runger kat/kota	
٠,.	stradat, rom riamah yang				
	recfasibitaal John ปัญหากรุกกา				
4	foodal moit comate yang				
	omaziltazi akwa sani asr Jon				
	sute / off site;	Jumbil	эсі шилінші		
ο.	Jumlah perumahan yang	yang sadah	n diengkapi		
	rectasilitasi MPNH	PSU (Preser	яся, Зыяна		
6	Trimbal mrit ermalı yarış	dan Littisa	Մասոլ		
	corbaditael aksos (VII)				
۲.	Junulai, pengentiang yang				
	sensertifikası				
8	Inmiah pengembang yang				
	ontrogistansi				
- 6	timilat (pengenten), pang				
	mendapai penyuluhan atau				
	pelabbott				

e) - Ketenteraman Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat (Babat Urusan : 6%)

No	HCC Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1,	Jumlah pelangsaran dan penguduan trantibum dalam kab/ Kata yang ditangant Jumlah Sattimmas yang terbuthden dikukuhken Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Polisi Famong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum Tersedianya sarana penananan minimal	Persentase Gangguan Trantikum yang capat diselesahkan	Jumich pengaduan yangdilangini x 100 % Jumlah pengaduan pebuggaisui yang masuk	14%
2.		Persentase Perda dan Perkada yang		14%

No:	IKK Gutput	16K Gurnome	Rumes	Bohet
3.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal Persentasa jumbah penduduk di kawasan pewar bencana	ditegakkan dumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi	x 10.7% Jumich keseturuhan Perda can Perkuta yang memuatsanksi Jumish wanga negara yang mempereleh layanan informasi rawan bencana.	14%
	yang mampardah informasi macan bencama sestari jenis ancaman bencana	rawan kencana		
4.	Persentase penyelessian dokuntur PPB sempai dinyatakan sah/legai Persentase penyelessian dokumen kenkon sampai dinyatakan sah/legai Avasantasa jumah mencuruhan wanga megara yang dari pelatitum	Jumlah wanga negara yang memperoleh kayanan pentegahan dan kesiapsiagaan terbodap bencara		1455

No:	IKK Gritput	16K (arreome	Rumes	Hobet.
	4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan b. Persentose warga negara yang mendapat layanan yastalops penanggukangan bencara dan satana yastarana penanggulangan bencara 6. Persentase warga negara yang mendapat perulatan periladangan			
5.	Prisculase krimjatar responsiverang dari 24 jam untuk setiap status KLB Persentase krimatar responsiverang dari 24 jam untuk setiap status darinat benesia.	kıyanan penyekunatan dan evakuasi kerhan	mempereleh layanan penyekmatan dan ewakuasi	14%

a HCC Cutput	1KK Gurcome	Runnes	Bobet.
3. Persentasa jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darupat pencang 4. Persentasa jumlah kerban berhasil dicari, dibiong dan dawakusat berhadap zejadian bencana 1. Jumlah dan jenis kesusan benyelamatan dan evakuasi pada kendisi membahayakan manusas (aperasi daru at non kebakaran) oleh Dinas Penadam Kebakaran dan terselamatan di zabupatan/kota 2. Terselianya pus sekua danker yang dikngkapi	Persentase pelayanan penyelamatan dan cyakuasi karban kebakaran	Jundsh lavanan penadaman, penyelamatan dan evakuasa kerbah dan terdangak kebakanan di kebupaten/kata dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Penadam Kebakaran cam Penyelamatan/ferangkat Eserah ditambah jumlah laganan penadanan di kebupaten/kata dalam tingkat waktu tanggap oleh	14%

No.	IE3 Gutpot	16K (tirreome	Rumes	Eobet.
	sarana prasarana senyelamatan di kanter aesamatan 2. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergentian (shift) di kanter kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapt dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuast di setiap keharahan/desa 5. Jumlah dan jents sarana prasarana pemadaman penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparatur pemadam kebahasan yang memenahi Standar Kualifikasi Pemadam sebagamana dimaksud		dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemacam Kebakaran can Penyelamatan/Ferangkat Daerah 	

No.	IKA Gutpot	16K Gurnome	Rumes	Pobet
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 16 Tahun 2009 tentang Standar Analifikasa Aparatur Pemadam Kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sian perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan ketakaran 8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur penisasan kebakaran kapasitas aparatur penisasan kebakaran			
7.		Waktu tanggap (response time) penanganan sebakanan	Rata-sata wakhi banggap, dihih ng dari edeposan, penyiapan tim dan perabatan, jacak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14%

t) Sosia. (Bobot Urusan : 5%)

No	HCC Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
1. 1. 2. 3. 4.	dumlah layanan data dan pengadunan yang dimiliti disebilitas terbuitar, anak terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM. Jumlah Timbenksi Cepat yang dibentuk. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, laujut daia terlantar, laujut daia terlantar, laujut daia terlantar dan gepeng yang dijangkau.	Persentane (%) penyandang disabilitas- terlantar, amak terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenubi kebutuhan dasanya di haar panti (indikator 85%)	Jumish penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, ianjut usia terlantar dan pelandangan pengantis yang terpenahi kebutuhan dasarnya di hampandi x 100 %. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, ianjut usia terkentar dan gelandangan pengemis	30%

No	HCC Cortpor	TKK (turnome	Rumus	Hobet
6. d	imiliki umiah penyandang isobilitas terlantan, anak erlantan, lanjut usia			
11 P	erlantsu dan gepeng yang penerima paket ermakanan sesuai standar tei			
8 10	Dunis hrumsh ingzah/shelter/ tempat inggal sementara yang Imiliki sesuai standar			
d to	umiah penyandang isabilitas terlantar, anak erlantar, laujut usia erlantar dan gepéng yang recericar paket sanalang			
	umian penyandang Sabilitas terlantse, anak			

No	IEX Gutpet	10K Our nome	Rumus	Hobet.
	dan/atau relawan sosial yang			
	disediakan			
13	Jumin's penyundang			
	disabilitas terlantar, scak			
	terlantso, lanjet esia			
	terionias dan gepeng yang			
	merdapatkan bimbingan			
	fistk, mental dan sosial			
	sesuai standar di kelnarga,			
	masvarakat, Dinas Social,			
	Rumah Singgah/ Sheiter			
	dan/atau pusat			
	kesejahteraan sestai			
.1.5	Jumla'r bimbirgan sosial			
	yang dilaksanakan kepada			
	keluarga dan masyarakat			
17	. Jumbir penyurahng			
	disobilities terlantar, anal:			
	terlantar, lanjut usia			

No IEC Gutput	lick (arrenne	Rumes	Hobet.
terlantas dan gepeng y	mak nen sung made asia arag		
desar 19. Juniah penyand disabilitas terlantar, si	ong nak isia sug		
penelusur at kelungu 20. Juniob penyand disabilitas terlantse, s.			

No:	IEX Curput	16K (hr come	Rumes	Pobet
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gepang yang direumihkasi dengan kelitorga 21 Junikah penyandang disabilikas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			
2.	Jumiah kerban bencana yang mendapat makana. Jumiah korban bencana tang menerima paket sandang Jumiah tempat penumpangan pengangsi yang dimiliki	bentana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	Populasi korban bencana alam	5064

No:	HCC Gritput	16K Girreome	Rumes	Pobet
k a, J n 6. J r k	umlah paket permakanan dinasas begi kelempok rentan tumlah kerban bencana yang nereriman pelayanan jakungan psikososial buntah Pelerja Sosial butasional/tenaga sosial penjatan sosial pengersedia		jaminan sesial pada saal Can secolah tanggap darurat bencana deerah kabupaten/kou:	

Urusan Femerintahan Wajib Cidak Berkaltan Pelayanan Basar

a) Tensga Kerja (Bobot Urusar: : 3%)

No.	ПК Остра:	IKK Outcome	Runus	Botot
1.	Dekumen perencansan teruga kerja kaha-paten/kota. Describese akurasi proyeksi indikator dalam rencana teruga kerja. Jumlah perusahsan yang menyusun rencana teruga kerja di kabupaten/kota.	yang dilaksanalam yang		
2.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi khastar Persentase instruktur bersertifikatkompetensi Basio umlah instruktur teriadap peserta pelatihan Persentasa LPK yang terakreditasi Persentasa LPK yang memiliki	Komputansi		23%
3.		Tingkai Froduktivias Tenaga kerja	FUIS (tohun perjolen jatos dason harga konstan 	20%

1.	١.	Persentasa pertisahaan yang	Persentase Pernisahaan	Jumian Perusahaan jang	2056
		telah memiliki Pasturan	уашр педиларкан (ж.а.	шевлюрьки tata, koola koja	
		Dominationary [19]	koda kerja yang layak	vang biyak	
	e.	Persontese perusahaan yang	дтутки, дья вірови,	x 20076	
		te ali merriliko Pergunjaan	Struktor Skala Upali.	Jumila i Perusahaan	
		Korjo Borsama (PkB)	den terdalfar pesetta		
	8	Pokapitulasi tahuran	BP18 Krt mags ker jaan)		
		gondah kerdisterasi ter/tak			
		yang terestat, tederasi			
		SF/SR yang remarkt, 92/SB			
		di perusansan yang tercatat,			
		SF/S3 4 had ponedoan			
		yeng tercepat dan anggore			
		SP/SD di perusahana			
	1.	Personase perusahaan yang			
		sudah menyasun strektur			
		ziwia upah			
	-	Возмонаяе регозаваял ужод			
		teah terbattar sopetai			
		pesenta BAUS			
ı		Kefenssylker[katr	ı	ı	
	Ġ.	Persenrase juni ah			
		perusahasur yang berselisih			
		dimilatoringsik kraja			
	7	January Denotehou			
		pieros a ficaci			
	Э.	Jumlah perselisihan			
		kepentingan			
	rc:				
	ıc	keprantingson			
	ic	kepentingan Jumlah perselisihan antar			
	ıc	keprontingsm Jumbah persediseban antan Senkat Pekena/Senkat			
		kepentingan Jumbah persedisahan antar Serakat Pekeng/Serakat Bernin (SE/SB) dalam 1			
	11	kepentingan Jonalah perselisahan antar Senkat Pekena/Senkat Beruh (6F/SB) dalam 1 (seth) perusahasa			
	11	kepentingan Jumlah persediseban antan Senkat Pekena/Senkat Bernin (6F/SB) dalam 1 (seth) perusebasi Jumlah persedisiban PHF			
	11	kepentingan Jonalah perselisihan antar Senkat Pekena/Senkat Burun (SE/SB) dalam 1 (seth) perusehaan Jonalah pesselisihan PHE Jumlah pekerja/huruh yang			
	11	kepentingan Jonalah perseliseban antar Senkat Pekena/Senkat Bernin (6F/SB) dalam 1 (seth) perusebase Jonalah perseliseban PHF Jumlah pekerja/buruh yang ter PUK			
	11	kepentingan Jonalah perselisihan antan Senkat Pekena/Senkat Bernin (6F/BB) dalam 1 (seth) perusahasa Jonalah perselisihan PDF Jumlah pekerja/huruh yang ter PDK Jumlah perselisihan yang			
	11 12 13	kepentingan Jonolah perselisihan antar Serakat Pekena/Serakat Burun (6F/SR) dalam 1 (seth) perusahaan Jonolah perselisihan PHF Jumlah pekerja/huruh yang ter PHK Jumlah perselisihan yang diadessikan melalut			
	11 12 13	kepentingan Jonalah perselisihan antar Senkat Pekenag/Senkat Bernin (SE/SB) dalam 1 (seth) perusehaan Jonalah perselisihan PHE Jumlah pekerja/huruh yang ter PUK Jumlah perselisihan yang diadess Ran melalut perunding er lepantin			

	1	Barrage			
	['*	Persenrese percellathan			
		hobuncan industrial yang			
		doch seikan notatni			
		Perpanjan, Besama oleh			
		Mediator Li bungan			
		Infostriel			
7	١.	stranger trade is some	Personic se Terrago berja	combabilities cokes (perioral bedja)	9.5%.
	l	teldedia di wibyah	young ditempetken	yong ditempatkan	
		katin paren/kola	(dalam dan loar negen)	× 100.4-	
	.٠.	Jumlah pencad krija yang	mealin mekaname	i nmlati pecesike: yang terdadar	
		terdadian di Kab/kota	layanan Antar Kerja		
	3	Jumlah Prose, Kerja Khasus	dolaar valeych		
		(BRIS) wilayah kab/kota	katupaten/kota		
	1.	Jilmlah enaga Kerja			
		KLugug tetdaftar dalam satu			
		Labu seten/kota			
	5-	Jumlah Pelabet Fungsiraal			
		Pengantas Kerja			
	٠	Jimlah Tembaga			
		Periodicipatan Terrapa Kinja			
	_	Consess J. P. S. P. Sandan Service			I
		Swaste (LPTNS) landat kega.			
	l	Jokal dalam satu wilayah			
	ļ	kah/kista			
	ļΫ	Juniah peganjian serv			
		yang disal kan oleh dinas			
		hidang ketercegakerjaan.			
		Kah/Kata.			
	i*.	Jumilati penempatan tenga			
		kaga uidadut liborulasi			
		Pasar Kenja (IHC) Online			
		(SISNAIGER)			
	٩	Juniah Calon Beorga			
		Migran Indonesia			
		(CPMII/) caloni tenaga, kerja			
		Indonesia (CIRI)yong			
		mendapatkan kesalikasi			
	100	Almolalia (Monta Prizega)			
		Wigger Indonesia			
		(СРМІ)/пайлі тенаді. Пета			
		Indonésia (CTM)yang terdana			

LiJimilah Calon Pekerja	
Micron Indonesia	
- (CPMI)/Cabar - maga - Kega	
Indoorsia forkfi yang	
mendapadan fasilitasi	
kepelangan	
2 Juniah - Dalon - Pranja	
Migran Indonesca	
(CPMII) / Caloni Tenaga, Rena	
Indonesia (cTRI) yang	
mendapotkon pendidilan	
dan pilatihan ku ja	
? Date pemberdaysan Pescus	
Migrati Indonesta	
(PMI)/Tonago Kerjo	
Inforesia (IfC) numa dan	
kelo, agarnja	
4 modali Layanan Terpadu	
Solu Alap (LISA) your	
ell-anniban	

g) - Pembentaycan Perempuan dan Perlindungan Anak (Boost Urusan : 3%)

No	HCC Cutput	IKK Sutcome	Rumus	Pobet
1.	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daeruh kebupaten/leda yang telah dilatih PJG 2. Jumlah program POG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melani amalisis gender di fingkat kabupaten/kota.	belonja langsung APRD	Jumish ARO pada belanja lungsung APRD 	3956
2.	Jumiah media massa (cetak, ekik roniki yang bekruja sama dengan pemkah/keta (dinas pupu) untuk melakukan KE pencegahan keberasan terhadap anak Jumiah lembaga kayanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Persentase anak kerban kekusaan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah sinak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) kurban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kuta yang didampingi 	33%

No.	IKA Gutput	16K (turnome	Rumes	Pobet
	3. Persentase korban kelenesan anat yang terlayani 4. Juniah tembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5 Juniah tembaga layanan anak yang mendapatkan bariban kenangan/tasilibas oleh pembab/kota (APED kab/kota)			
3.	I. stomla'i onganisesi kemasyatakatan yang bergerak ilim bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatikan Junilah kader perempuan tingkat kabupaten/kota ()	termasuk TPPO (per 190,000 penduduk	Juniah perdupakn yang mengalami kekerasan x .00.000 Juniah penduduk perempuar	33%

No	IKA Gritpot	IKK Gurrome	Rumus	Pohot
	yang suitah dilatih 3. Jumtah lembaga lavanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatinan 4. Jumtah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan kenangan oleh pemerintah kabupaten/kota 5. Jumtah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat dacah yang sulah dicyahusi 6. Jumtah tembaga penyediaan layanan pertindangan laik perempuan ya telah teratsudardisasi			

No	Hex Curps	at .	16K Gir rome	Rumus	Hobet
lock	seniase cerasan perer loyum	korhan npuon yang			

h) Pangan (Robot Jrusan : 3%)

No	TGK Dulpid	TICK Outpresses	Rumas	Trobat
2	Tersedianya, inihasiruktur perudangan dari satuna pendukung lalunya untuk pengimpanan cadangan pengun. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pengen lokot. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyanakat dalam pangka pengendan		Juniah calangan pengan x 100% Juniah kebutuhan pangan	130%

No.	KK Durput	16K Stricome	Rumes	Hobet
	konunsi pangan yang			
	beragam can bergizi			
	seimbang			
- 13	S. Tersedianys pers ketabanan			
	dan kerentahan pangan			
1.3	6 Tertanganinya kerawanan			
	pangar			
100	7. Tersahirkannya cadangan			
	pangan pada dacrah rentan			
	rawan pengun			
23	8. Terlelisenearya pengawasan			
	keamonar, pangan segar			

i) Pertonahan (Bobot Urusan : 2%)

No	HCC Cutput	IKK Outcome	Rumus	Pobot
1,	Diferbitkan Gieb Supati/Wali Itala 2 SK Dupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyok Lawireform yang bersumber cari Tanah		Luas tanah sesuai peruntukan ijin okusi 	
2.	Kerebihan Maksimum/ Alisentee dan Baftar Subyek 3. Six Bupwi/Wali kotu- tentang Pehetapan Besamya Gariff Engl Kepada Bekas Femilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		Juniah penetipan tanah untuk pembangunan fesilitas umum 	
Э.	Dokumen Ezin membuka tamah Dokumen Perencanasu Fenggunasa Tsuah	Percedianya lokusi pembangunan dalam rangka penansanan model.	Luas tarah yang talah dinanfastaan sesual dengan peruntukannya di atas izin lokasi	

No.	HCC Gritpot	1KK Ourcome	Rumes	Hobet
	Kabupaten/Kola			
4.		Cersedianya Tanah Ohyek Landreform (FO.) yang slap dirediscribusikan yang berasal dari Tanah Kelebikan Maksimum dan Tanah Absentse	Jumlsh penerima tanah obyek iandreferm dengan inasan yang diterima, lebih besar sama dengan 0.5 ha,	
5:		Persodianya tanah untuk masyarakat.	Lucis tanah yang telah dinanfastkan berdasarkan izin Membuki Tanah x 100%	
			Luas Izin Membuka Deral yang diterbikan	
G.		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui	Jumlah sengkera tanah garapan yang ditangan x 150%	

No.	IK & Gutput	16K Girreome	Runnes	Hobet.
		mediasi	jumlah pengaduan sengketa	
			tanah garapan	

j) Lingkungan Hidup/Bobot Urusan : 3%4

No:	IK's Cutput	180K Outrome	Fuotes	Hobet
1)	Hazil perhitungun provinca tertisatap: a. indeks kualitas air (IKA) b. indeks Kualitas Udara IKU) 6. indeks turupan liutan (ITH)	Indeks Koolitos Lingkungan Tadup (IKLH) Kub/Kota		3359
2.	Tersedisnya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupatan/kata	Torlaksananya pengelelaan sarupah di wilayah KabyKoto	Total Vol sampah yang dapat ditangani 	33%
3.	Dona isin PPLII dan PUU LII yang diterbitkan oleh	Ketaatan, penanggung jawab usaha dan/atau	Jumkhi penanggung jawab usaha-dan/atan kegiaran yang	53%

No.	IK & Gutput	1KK Gureome	Rumes	Bobet.
The state of the s	pemerintahi damah kabupeten/kota 2. Rusio pejotat pengawas L-I di doerah (PPLHD) di provinsi terbadap usahat yang isin lingzungan, ran PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota 3. Penetapar hak MEA terkait dengan -PLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. 4. Tertasilitasinya kegiatan peningkatan pengabahuan dan ketrampilan masyarakai hukum adat terkait PTLH Jumlah tembaga Lemnayarahatan yang diberikan dikict 5. Penanganan Pengsduan	Engkungan, izin FPUI dan 200 LH yang diterbilkan oseh Penseriakah Daerah	n.clangar terhadap zin Bagitungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerimah Kah/ sova	

la	IK & Gritput	16K Giricome	Rumus	Robet
	masyaraka, terkait izin			
	lingsungan, izin FPLH dan			
	PHO LH yang di ferbitkan			
	olen pemeriniak daerah			
	kabupaten/kota lokasi			
	usana dan dempaknya di			
	daérah kabupatèn/kota yang			
	ditangent.			

k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bohot Urusan : 2%)

No	HCC Cortput	JKK Outering	Runnes	Thisbut
1.	Penerbitan akia perkawinan Penerbitan akia perceraian Penerbitan akia kematian	Perekanan KTP elektronik	Junish Pershuduk beramar 17 tahunke alas yang memilik KTP 	95%
	4. Pengajian data kependudukan		Jumlah penduduk 17 ahan ke- atas	
2.		Persentase ansk usia 0.1-7 talinu kunung t (satu) bari yang memiliki k1/s	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (autu) hari yang sudah meniliki KIA 	2566

No	HCC Cortput.	IKK Guncome	Rumus	Hobes
		Kepenchikan akta kelahiran	Jumlah anak usia C-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir 	25%
		Junish OPD yang telah memarisatkan data kepandudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumish OPD vang telah memansastian data kependudukan berdasarkan perjecijian kerja wana 	25%

i) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)

No	IKX Cutput	IEK Guncome	Fumue	Hobet
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama unter dese terum terjalah dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tanun sebelumnya. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan tembaga kemasyarakatan dan tembaga	Persontaser pinggulasan desa tertinggal	dumbh desa berlinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkar Indeks Desa Membangun per tahun	.era
2.	adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jundah desa berkembang yang memenuhi sriteria desa mandiri	50%

No	IKK Gutput	16K Girreome	Rumus	Pohet
4, Jun yen ken sels key	diberdayakan olah peningkatan desa g temboga nasyandanan dan lemboga toya niclaksanakan iatan ekonomi produktif peniterdayaan		per tahun bentasarkan Indeks Desa Mombangun per tahun x 100% Jumish desa berkembang (per- awal tahun ni	

m). Pengandalian Amfuduk dan Keluarga Barencana (Pobot Urusan : 2%

Na	IK's Cutput	JKK durrome	Rumus	Hobot
1.	1. Tersedianya dokumen Grand Deskar Pembanganan Kependuankan (GDPK) yang di-Perdaksa 2. Median Usta Kowin Pertama Ferenguan (MUKP) seluruh wanta umur 25-19 tahun 3. Angka Kelahiran Kemaja muru 15-19 tahun Age	Total)		3389

No:	IKK Gritput	16K Girreome	Rumes	Hobet.
	Specific Fertility Rate/A3FR 15-19] **A Fersencase masyonikut yang terpapor si pesan Program EKBPK (edvokasi dan FIE) **S Jumbah stakahelders/pemangku kepentingan dan mitra kerja herriasuk organisasi kemasyurukatan) yang terperya serta ahtif dalam pengelotaan program K-KBPs			
2.	Ferseninse Fusilitasi Feschatan (Kaskes) yang slap melayani KB MKJP Ferseniasar Poseda KB Aktif (PA) Metodo Koutrasopsi Jangka Panjang (MKJP)	kontrasepsi Medern	Jumlah peserta KE Aktif Modern	3356

No.	IKK Gritput	16K Girreome	Rumes	Pobet
	Femerintah Damah Provinsi yang memiliki Kelempek Kerja KKHPK yang elektuf Fersentasa pelayanan KH Fasas Fersalinan			
3.	Persentiae kesentaan KB di Kabupaten dan Keta dengan kesertaan rendah Persentiase keseriaan KB keluanga Penceuma Bantuan Jurua (PBG)		Jumbih PUS yang ingin bar-KB tetapi tidak terbyani x 130% Jumles Pusangan Usia Subur	3354

n) Perhubungan (Bobat Orusan : 3%)

No	IKX	Cutput	EG	C Our come		Runnus		Robet
1.	Persentase fasilities termined engknoon is	tersedianya penyelenggaraan penumpang dan Tipe C	kabupat		anen augku	konektvites Kata = JK) tsu jalau) = (li tau sungei, :	x boter K2 x Bulot	30%

Na.	HCC Gritpot	16K Girreome	Rumes	Bobet.
	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penerapar, taraflangkutan orang antar keta dalam kabupaten, seria angkutan perkotean dan pedesaan ketas ekanomi 1. Persentase pelaksanaan manajemen dan reksyasa lulu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau Kota		penyeherangan) IKI jangkutan jalan) - (Jumlah trayek yg dilayaru pd ko upaten/kota x bokot trayek) dibagi jumlah kebupaten/kota tarsebut) K2 (Angleitan Sungat, danau (an tenyeberangan) jumlah timas Penyeberangan yang teroperasi pd sahupaten/kota tab x bokot 'iintas) dibagi (jumlah kebutahan lintas tenyeberangan pada kubupaten/kota tersebut) Keserangan: IKI (Angkutan Jalan)	

No.	IKK Gutput	1KK Gurcome	Rumes	Robet
Na	IK Contput	16K Surrome	- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek AKAP - Jumlah lebutuhan meyek adalah jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tartantu dan kebutuhan meyek AKAP dalam kurun waktu tartantu. IK2 (Anglecten Sungal, Panau, Penyeberangan) - Jumlah tintas penyeberangan yang beroperasi adalah	Eolasi
			jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan	
			lintas penyeberangan baik	

No.	IKA Gritpot	16K Gurrome	Runics	Pohet
			lintas penyeberangan, perintis maupun komersii untuk menghubungkan ontor wilayah yang direncanakan dalam kurun wektu tertentu. Behet Angkutan Jalan arau Sangat, Danan can Proyrberangan! 1. Wilayah yang tingkat peleganan angkutan angkutan jalan bobot angkutan sankatan jalan bobot angkutan jalan sankatan SDP • 70, bobot ongkutan jalan + 30] 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan aut can penyeberangan sama dengan	

No.	IK Contput	16K Gircome	Rumes	Pohet
			divendingkan dengan angkutan jalan jalan jalan jalan jalan angkutan SEP at, boust angkutan jalan = 50] 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan kati dan dengan angkutan jalan jalan jalan angkutan SEP = 30 'boust angkutan jalan = 70] 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut jalah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut jalah jalah = 100) Hobot Truyek atau Lintas: a. Botot Truyek atau Lintas dengan trekuensa tinggi Jeox dalam seminggil, bobot = 1	

No.	He's Cutput	16K Gureome	Rumes	Hobet
			 b. Bobot Prayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam semingga), beber = 0.8 c. Bobot Prayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam semingga), Bobot = 0.5 	
3.		Kinerja Is'u Jinca: kabupaten/kota	V/O Retio di dalan kabupaten/sota	30%

ri). Venemukasi dan Informatika (Robert Hetsour : 298)

No	IKK Output	Bill Outcome	Rumus	Liobot
L,	menggunskan akses internet yang diamanhan yang	Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan	dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 	3594

No	BKK Output	IKK Octoone	Rumus	Robet
2.	Persentase penangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkunitias yang disediakan Dinas Kaminia			
3	Tersedianya sistem cicktronik komunikasi intra- pemerintah yang diseduakan Pitas Kominib (berbasis sutra, video, teks, data dan sunyai lainnyai dengan memaniaatkan jeringan intra- pemerintah			
3, 1	pelayanan publik pada	Persentase Lavanan Publik yang diselenggatakan secara cadina dan cantegoni	Jumlah Lavanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	35%

ło	вкк Опфи:	IKK Octoone	Rumus	Robet
	domain dan sub domain Instansi Penyelenggara			
	Kegura sesuai dengan FM Keminto No.5/2015			
	Persentase perangkat daerah yeng memiliki periol dan situs web yeng sesuai stanca:			
	Fersentase perangkat daerah yang mergimplementasikan lavanun aplikasi umum dan aplikasi lahurus yang diretapkan sesual dengan ketenuan perandang- undangan			
	Persentase layanan SPSE dayanan publik can layanan administrasi pemerintahan) yeng tercantum dalam dakumen proses bisnis yang			

ło	IKK Output	IKK Octoone	Rumus	Robot
	tekali diimplementasikani setara ekistronik a. Persentase layanan SPBE jiayanan publik dan layanan administrosi pemerintahan) yeng memanikatkan sertifikat elektronik			
	yang terdaflar acanai kelentuan peruturan perundang-undangan			
7	7. Persentase layanan putlik dan layanan odministrasi yang krintograsi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			
	Persentuse penungkat doesah yang menggunakan layanan pasat data pemerintah			

o BKK Output	IKK Octoone	Rumus	Hobst
Persentase peningkat daerah yang masyimpan data di pusat data pemerintah			
10. Fersenrase perangkat daerah			
yang memperbaharui			
datarya sesual sikhus jenis data (sosual renstra kommin)			
 Fersentasi data yang dapat berbagi pakai. 			
12. Fersentase perangkat deerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung			
smart city 13. Ferseniase ASN pengelola Tik yang tersertifikasi			
kompetensä di tawah pengelokaan Dinas kominda			
14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan			

No	iikik Output	IKK Octoone	Rumus	Pobet
	kepala daerah terkait implementasi e gwernment			
3.	masyarskat/mitra strategis penerintah daerah	panyebarati indomas. publik, mengelahui kebijakan dan program	domiał mesyanakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puttik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota × 100%	30%
	5 Persentase konter informasi terkat program dan tebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot as a sei hingan shat gi kemunikasi (STRAKOM) 6 Persentase diseminasi dan	kabupatenykota	Junuah pendaduk	
	havanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STAEKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			

pj. kaperasa, Usaho Kecil dan Menengah (Bobot Urusan 12%)

No	HCC Output	IKK Streome	Rumus	Pobot
2.	Persentase fasilitasi penerbinan ijin usoba simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase fasilitasi penerbitan isin pembukaan kantor cabang pabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase pemeriksaan dan pengawaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah keanggotaan dalam	yungberki:clins	Jumlah koperasi yang meningkat kualitosnya herdasarkan RAT, valume usaha dan assat x 190% Jumlah selaruh koperasi	30%

No.	IKA Gutpot	16K (tirreome	Rumus	Hobet
	daerali kabuputen/kota Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesebataunyanotuk koperasi dengan wilayah keenggotuun dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang mergikuti gelali bamotuk koperasi dengan wilayah			
tı.	beenggotaari dasun daerah kabupaten/kota Persentase jumish anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk zoperasi			
	dengan wilayah kemaggatana dalam daerah kabupaten/kota			

No	IKK Gutpot	16K (turnome	Rumus	Hobet
7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianumuk koperasi dengan wilayah kennggotaan dalam daerah kebasassa (keta			
Ь.	kabupaten/kota Fersentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembinyaan			
9.	Persentase lasilitasi penerbitan sertilikat Nomer Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi deman wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
13	Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pombisyaan untuk keperasi			

HCC Gritport	1KK Girreome	Rumus	Hobet
dengan wilayah keanggetaan dalam dasrah kubupaten/kota 11 Persentase yang diherikan dukungan fasilitasi pemewarununtak zopwasi dangan wilayah keanggetaan dalam daerah kabupaten/kota 12 Persentase koperusi yang diberikan durungan fasilitasi pendampingan kielemtagaan dan usaha untuk kaperasi dengan wilayah keanggetaan dalam daerah kabupaten/kota 13 Percentase kuperusi yang diberikan dusungan fasilitasi	TKK (Arcome)	Rumus	Polet

No.	IKA Gutpot	16K Gir come	Rumes	Pohet
No. 2.	dengan wilayah keanggetaan dalam daerah kabupaten/kota L. Rasio pertumbuhan		Jumlah usaha mikro yang	50%
	dukungan fasiltasi standarisasi dan sertifikasi jumlah realis 5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan			

No. IKA Gut	but	16K (urreome	Rumus	Hobet.
dukungan b. Sasio usaha diberikan dulu velatikan 7. Persentase (1) mikro yang pendampingan	ngan hisilitasi umlah tisaha g diberban melalui			

q) - Pensinaman Modal (Bobet Urusan : 359

No	TK's Guiput	IKK Gu gome	Numus	Balant
	PskDA mengenat peraberian fasilitse/intensif penanaman medal yang menjadi kewenengan dawrah kabupaten/kota Standar operasional proseduc pelaksaraan peraberian	investasi di kabupaten/kata	(Jumlah investes) tehun n- jumlah investesi tehun n-1) di kabupaten/kota 	1.30%

io IEX Cutput	16K Gureome	Rumus	Hobet.
fusilitas inscritif penanuman modal 3. Laporan estimast pelalusamaan periberian fesilitas/inscritif penanuman modal 4. Registan seminar bianis, terum, one on one meeting 5. Registan penerimaan mist penanuman modal 6. Registan penerimaan mist penanuman modal 7. Ronsultasi perizinan dan non perizinan renanuman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan renanuman modal	166 (arcone	Rumus	Echet
8. Penerbitan perizinan dan non			

No. II	CK Cutput	16K Ourcome	Rumes	Hobet.
kobupate 11. Pembina	an modal tingkat en/kota			
12 Tersedia Informas	33527			

r) - Kepemudaan dan Olchraga (Bobot Urusan : 2%)

No	HCC Cortput	JKK Outcome	Runtos	Disbut
1.	#25000000000000000000000000000000000000	[일 14] [6] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwimusaha di proviesi 	33%
2.	Junish pentuda yang nadapat pelathan kader		duadsh xaroda [16-30 tahun) yg menjadi anggon aktif pada	33%

No:	IKK Gritpot	16K Our come	Rumes	Pohet
	pengenbangan kepenimpinan, kepeculan, kesukaelawanan dan kepelaporan penuida 2. Jumkhi pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	organisasi kopunudaan dan organisasi sosial kemasyamkatan	organisasi kepenndaan can organisasi sosial kemasyarakatan di sabupaten/kota 	
а.	Juminh peintih o.ch reşu yang memiliki kompetensi di satusur? pendidikun Jumish peryelenggarasa event Ok prestasi tingkat daerah	Pening calant prestast	Junich perolehan medali pado event olahraga nasional can internasional	3354

s) - Statistik (Bebot Urusan : 2%)

No HCC Cutput	IKK Outcome	Rumus	Pobot
1. 1. Tersedianya buku pri daerah 2. Jumish survey steris sektural yang dibantkan 3. Jumish kompilasi steris sektural yang dilakukan 4. Jumish survey statis	Peningkot Goerah (OP.) jik yong menggunakan data statistik dalam tik menyusun perencensum penibangunan daerah	Jumish GPD vang menggusakan data statistik dalam menyusun perercansan pembangunan daerah x 100% jumish GPD	30%
sektoral yang mendaj rekomendasi dari BPS 5. Jumbah kompikasi stas sektural yang mendaj rekomendasi dari HPS 6. Persentase kelengkat metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkat	Persentase DPD yang menggunakan data dalam sat urbakukan evalussi pembangunan daerah an	Jumlah OPO yang menggutakan data surisak datam melakukan evaktasi pembangunan datash 	3065

tj. Persondian (Bobot Urusan : 2%)

No	HCC Output	IKK Outcome	Rumus	Pobet
1;	1. Persentase kegiman strategis yeng telah diamankan melalui kegiman pengamanan sinyal dibanding benyaknya jumah kegiman strategis yang harus diamankan 2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen kecamanan intermasi (SMR) dan arau aplikasi persendian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 3. Persentase sistem elektronik/asset intormasi yang telah diaudit dengan	200	Junish nilai yar awa keamanan intormusi	130%

io IEE Gritpot	1KK Gureome	Rumes	Hobet.
resiko kategori rendah 4. Persentasa titik diamankon dibording jamlah seharah titi pemeria, eli berdaserkan Pola Ar Kamunikasi Sandi yang ditetapkan	yang dengan k pada dawah		

u) Kebudayaan/Hebot Urusan 259

No	HEE Guiput	IKK Guarome	Rumus	Bahot
1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi finventarisusi, pengamanan pemeliharaan penyekanatan dan publikasi) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang		Junich eager budaya yang diestarikan 	13055

No	IK & Gutput	100 Ourrome	Rumus	Pohet
3.	dikembangkan (penyebarhuasan, penglojien, pengwan keberagaman) Jumbéh obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfantkan (membangan karakter bangsa,meningkatian ketahanan budaya,mdan			
1.	meningkatkan besejahteraan masyarakat) Jumiah 8DM, lembaga dan pesusata yang dibina (peningkatan kompetensi, stendarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapanitus tata kelola) Registor eagar budaya (pendafiaran, pengakan,			

No.	IE Courpor	1KK Gurrome	Romas	Robet
15.	penelajan, penelalan, peneringkatan, peneringkatan, penghapusan) Perindungan ragar budaya priwinsi (penyelsmatan, zonasi, peneliharaan dan pemogenan Layanan penjainan membawa cagar budaya priwinsi ke hen pessinsi		2012000	tadus
5	dengen dukungen data Pengembangan cagar budaya prostrasi (penelihan, resitalisak), adaptasi)			
	Pemantatan cagar indaya previnsi (dalam hal agama, sistai, pendidikan, ilmi pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) Pengelokan, pengamanan,			

No.	IK Corpor	16K Our come	Rumus	Hobet.
Na	pengembangan dan pengembangan koloksi uruseum 11. Peringkatan akses massarakat dalam penjekenggaraum dan pelaksanaan kegiatan 12. Peringkatan akses masparakat dalam pengebikan saram dan pengebikan saram dan prosarana museum kabupaten/kota 13. Pembentukan ang badaya	16K (tirrenne	Rumus	Pohet
	14. Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi 13. Fasilitas sertifikusi tim uhli nagar turcya. 16. Pemetaan adm cagar budaya.			

Na.	HCK Critput	16K Girreome	Rumus	Pobet
	dan permuseuman			
	17. Peningkatan kompetensi			
	pemperanien pemperanien			
	kabupaten/ko.a			
	18 Pyrywdiaeti sarama dan			
	prosarana pendaftaran caga:			
	budaya dan permuseuman			
	19. Per yelenggs as r — legistan			
	museum vang melibatkan mosvorakat			

ण् Perpustsksan (Bobot Orusac : २५६)

No		IKA Guiput	IKK Outrome	Rumais	Bobet
1.	1.	Rasso keurunkupan koleksi perpustakaan dengan			50%
	2.	penduduk Persentase ketermaniaatkan perpustaksan oleh	2. Indeks Pembang taan Libuasi Masyarakat		50%

No.	IK & Gutput	IKK Ontome	Rimins	Robet
0. L P P 4. F 5. d	nasyatakat, taso ketercukupan tenaga erpustakaan dengan enduduk ersentasi perpustakaan esuad standar nasional erpustakaan tumlah pemasyatakatan yanat membera di nasyatakat			
2 3 3	fumiah nesket, kuno yang fokuisisi/ dialih media digitalisasi/terdaftar yang da di wilayahnya tumlah neskeh kuno yang halih aksara dan dialih sebasa fumiah koleksi budaya etnis mantara yang tersimpan			

No.	IKK Curput	IKK Outcome	Romas	Hobet.
	dan/atau tentaftar yang ad	la		
	ol wilayahnya jitom'	**		

w) Krausipen (Bebut Person : 2%)

No	IKK Cortput	IKK Guirome	Famous.	Robos
	telan dibuction dotter arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana banta tema belik 4. Persentase jumlah arsip yang	ersip sebogo: pahan akuntabilitas kherja, alat tukti yang seh den pertanggungjawaban nasionah Pasal 40 den Posal 59 Undang Undang	T = (a + i + s + j)/4 " tingkat ketersediaan aralp s = persentase susip aktif yg teish dibar kan daftar sesip i = persentase arsip maktif yg teigh dibar kan daftar arsip s = persentase susip statis yang telah dibaratkan sanana hanta terun balik j = persentase jumlah arsip	50°A

No:	HCC Gritpot	IKK Outcome	Rimins	Bobet.
		2004	yang dimasukkan dalam 900N melalul JIKN	
3.	1. Pennanahan araip yang sesuai NSTK 2. Peritudungan dan penyelamatan araip aldibat bencaus yang aranai NSPK 3. Penyelamatan araip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSTK di provinsi 4. Autentifikasi uraip statis dan araip basil alih media yang dikelola oleh lembaga kesuai NSTK 5. Pencurian araip statis yang	perianggungjawahan setinp uaprik kehidupan berhangsa dan bermigera untuk kepentingan negara pemerintahan, pelayanan publik dan	T= tingkat keberadaan dan keutuhan arstp sebagat bahan pertanggungjawahan m = tingkat kesesusian kegistan pentangkat kesesusian kegistan pentasushan arsip dangan NSPK	3096

No.	IK Corput	IKK On toone	Runjus	Pobe
	pengelolaannya menjadi		kabupatan/kota dengan NSPK	
	kowenangan daerah provinsi		a - tingkat kososualan kegiatan	
	vang dinyotakon bilang dalam		autentikusi ursip soms can	
	bentuk deftar percerian acsip		arsty healt allt media dengan	
	yang sesuai NSPE		NSPK	
6	Penerbitan izin penggunaan			
	arsip yang bersifat tartutup		c - tingkat kesesuaian kegiatan	
	yang disimpan di tembaga		pencarian orsip statts dengan	
	kearsipan daerah proxicsi		NRPK	
	vang sesuai NSPE		1 = tingkat kesesuakan kegaram	
			penerbhan izin penggunaan	
			arsip yang bersiint tertutup	
			dengan NS-K	

Uzusan Filihan

s) Kelautan dan Perikanan (Bobot Urusan : 2%)

No:	IKA Output	IKK Outcoms	Dimous	Dobot
1,	1. Jumin's ruman tangga nelsyan yang melakukan diversifikasi usaha RTP 2. Fersentase Pempat Pelejangan Isan yang operastoral 3. Jumin's Isin Usaha Perikanan ItuF di bidang pembudidayaan Itam yang usahanya dalami (satu) baerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 4. Jumin's pembudidaya ikan yang memperoleh keglatan pemberdayaan Iperatdikan dan pelatiban/penyaluhan dan	Jumich Total Produksi Perikunan (Jungkap den Budidaya) kabupaten/Zata (sumber data: one data KKP)	Junich Total Produksi Perikenan (Pengkep can Budidaya) Eaburaten/Kista (sumber data: one data KiC)	0635g

No.	IK & Gritput	IKK Outrome	Rimais	Hobet
1 1 3. d	sendampingan/ kemitaan usaha/ armudahan akses ptek dan miormasi/dan nenguatan kelen bagsami jumlah benih budidaya air war dan dir payau yang di penduksi.		20000000	

b) Pariwisale (Bobot Brusan : 3%)

Na	IK Cortput	IKK Outcome	Rumas	Hobot
1.	Juniah entras pengelokan destinusi Juniah kelengkapan infrastruktur dasar, tsalitas	hunket wisnawen monoanegara per	(Juniah wisatawan tahun n-1) x 100% Juniah wisatawan tahun n-1	5054
·	umum, dan fasiftas partwisata			2006
2.	 Juniah tanta daftar usaha pariwisara per sub jeris usaha di kabupaten/kots 	perjabatan wisabawan nusaratara yang datang	Jumlet wisetewen tahun n-1) Jumlet wisetewen tahun n-1)	2054

No.	IKA Gritpot	IKK Ontrome	Runna	Pohet.
	4. Jimilah wisatawan mancanogara per	ke kabupatri./keta	Juniah wisatawan tahun n-1	
8,	kebangsaari 5. dumbah promosi event dawah yang terlaksana di dakan negeri 6. Jumbah event haar negeri	'Yingka: hunian akomedasi	diritish kamar yang trijual	2064
4.	yang diikuti prosinsi 7. di adah ladastri padwisatsi daerah yang berpurtisibusi pado even promosi	Kontribus, sektor partedsara rerhadap PDRB hargs bertaku	Kontribusi sektor parivisata terhadap PDEH hangi berlaku	20%
5.	partwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang distritifikasi 9. Persentase 80M peserta pendelahan sekta kepartwisataan	Konurbust sektor parreisana terhadap PAU	Kontribusi sektor partvisuus terhadap PAD	20%

No.	IK Cutput	IKK Outcome	Rimpia	Hobet.
1	Jimlah lokasi yan memperaki dan pembinan masyarakat dan pembinan	n.		
j j	kemitraan usah masyarakat	al .		

u) Partenis i (Bobot Uruseur - 856)

No	HCC Cutput	IKK Octome	Runus	Pobot
1.	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prosarana pertanian yang digunakan 3. Penertiran izin usaha portanian 4. Persentase prosarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kah/kuta	Produktisitas pertanian per liektas per tahun	Jumish produksi pertanian pangan per laiktar per tahun 2100% kas samen	30%

No.	IKA Gutpot	IKK Outcome	Rimins	Pobet
2.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Penururan kejadian dan jumlah kusus penyukit bewan menukir	Jum'ah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (n - jumbal kejadian/kasus penyakit bewan menular tahun sebelumnya (t-1) ====================================	50%

d) Kehntaneo (Bobot Urusa): 294

No	IKK Cotput	IKK Quincine	Francius.	Robes
1.	Tersedianya dekumen remona pengelokan Tahura Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga Pemulihan ekosisten pada			
	Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHUSA			

e) - Energi dan Sumber Laya Mineral (Bobot Urusan : 354)

No	HCC Cutput	IEEE O'cteome	Ruintis	Bobot
1,	Penerbitan izin pemanbatan langsung peros bumi dalam daerah kah/kata	Persontase perusahaan pementatan penas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Juniah perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan penas humi yang memiliki ijin x 190% Juniah perusahaan penantaatan panas bumi	130%

0. Pendagangan (Bulast Urusan - 3%)

No	HCC Cutput	IKK Octoure	Runus	Pobot
	diterbitkan sesusi dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Teko swatayan Persentase pentrbitan TDG Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG Persentase penerbitan STPW yang tepsi wakin untuk:	Persentase polsku nsabs yang memperoleh izin sesuni dengan ketentuan (UPP/SIUP Fusat Perbelenjaan don IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usana yang telah memiliki isin sestati ketentuan 	33%

No:	IKK Curput	IKK Outcome	Runna	Hobet.
	fasilitas penyimpanan kanan bertahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelah bahan berbaya di tingkat daerah Kah/Kota 6 Persentase penerbitan SEKA yang tepat waktu 7. Persentase pengembangan dan pengelokan sarana distribusi perdagangan di witayah kerjanya 8. Persentase koefisan yariasi barga antar waktu			
2.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersahurkan	Persentase kineria realisas: popult	Realisasi x 100% RDKX	3356
J.	Persentase afat-afat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTOP) yang	Persentase alat - alat ukur, takar, imbang dan perlengkap annya (UTTE)	jumlah UTTP Berlanda Tura Sah yang berlaku pada tahun berjalan 	03%

No.	IEX Critput	IKK Outrome	Runns	Bobet.
	ditera/fera uking dalam tahun berjalah 2. Persentiase besesuman BUKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berjaka	bertanda tera sal, yang bertaku	junilah potens UTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kata	

g) Periodustrian (Polot House r. 33%

No	IKX Catput	IKK Octowne	Runus	Pobot
1.	Persentase jum ah penetapan izin usaha kawasan industri ((UKI) dan izin perhasan kawasan industri ((PKI) yang lakasinya di daerah kabupatèn/kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Wumlah Industri kecil can menengah tahun n- Jumlah industri secil dan menengah tahun n-1) × 100% Jumlah industri kecil can menengah tahun n-1	17%
2.	Persentase tersekssičeninya dokumen RIPIK sompal dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Persentase perempaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator		1756

No:	IK & Gutpot	IKK Ontome	Rimius	Robet
3,	1. Persentase Jumish izin yang diterbitikan usaha fidustri (101) kecil dan 134 menengah yang diterbitikan. 2. Persentasa jumbil ikin perhasan industri kecil dan menengah yang diterbitikan.	pert.bangunan industri dalam RIPIN yang ditebapkan natam RPIF Persentase jumlah basil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Isin Usaha ludustri (EU) Kecil dan ludustri Menengah yang dikeluarkan oseh instansi terkait	Jun lah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil penambuan x 100% Jam lah izin yang dikebuarkan	17%
4.		Persentase jumlah hasil pemantanan dan pengawasan dengan jambal ban Perbasson Industri (POI) Kecil dan Industri Menengah yang dikaluarkan oleh instansi terkali	Junilah izh, yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hesil pemantauan 	17%

No:	IKK Curput	IKK Outome	Rimina	Hobet
5.		Persentase jumlah hasil persamanan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (JUKI) dan Izin Perbasan Kawasan Industri (JPKI) yang lokasinya di Daerah Esbupaten/kota	Jun lah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporon hasil pemantauan	17%
6.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengan dan perusahaan kawasan industri di kab/kwa ya masuk dalam SII Nas terhadap tapal populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kwa	Persedkurya informasi Industri secara lengkup dan terkini	Tersedionya informasi industri dengan hatsa waktu 0-6 bulan Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan teformasi produksi dan loopasitas penduksi hafernasi bahan baku dan bahan pendung teformasi bahan telau/energy	1759

No.	HCC Cutput	IKK Outcome	Rimos	Robet
			Informasi investasi	

h) "feanan ignasi (Bohat Urusan : 194)

No	IEX Curput	IKK Or trome	Ruttus	Bobot
1.	Juniah kawasar. transmignasi yang difasilitasi penerapannya Juniah satuan pentukinan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya Juniah setuan pemukinan vang dibian			

Fungsi Penunjang Jrusan Pemeruntahan (Bobot : 109%

s) Perecesuaso dan Keuangan (Bobet Urusan : 30%)

No:	IKA Cutput	IKK Outcoms	Dimpus	Dobot
1,		Kasio Belanju Pegawadi har guru dan tenaga kesebatan	Jum ah belanja pegawa di uar guru dan tenaga kesehatar 	36.7%
2.		Rasio PAD	dunish PAD X 100% Junish APED nor migss	16.7%
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pencerintah (SPU)	Tingkat Mattritas SERP (belown dini'si (0)/lead t/lead 2/lead 3) bordssarkan taparan Hasi. Quality Assurance (DA) yang dikemarkan oleh BPK-	16s.7%	
		Peningkatan Kapabilias Aparat Penguwasan Intern Femerimah (AFIF)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinikai '0)/fevel 1/fevel 2/fevel 3) berdissarkan Luporan Hasi Quality Assurance (QA) yang dikebuarkan oleh BPK3	16.7%

No.	HCC Cutput	IKK On frome	Rimora	Hobet.
4.		Pemerintahan Umum	Jum'ah belanja urusan pemerintahan – transfer etpemilitures	16.7%
5.		Opini Laporan Keusugan	Opini Laporan Keuangan	10.7%

b) Pengadaan (Bobot Urasan : 10%).

No	HGC Cortput	IRK Outcome	Phimpis	Hobot
1.		projek konstrukci yang dibawa ke tahun berikutnya yang	jumlah kontrak infrastricktur dengan nilai besur yang peda pembang man dalam 3 knartal yang ditanéstangani pada kuartal pertama tahun ii	J354
2.		Persentase jumbih pengadaan yang	jumlah pengabian yang dilakukan dengan metode kompedif	53%

No.	HCC Cutput	IKK Outcome	Rimins	Hobet
		dilakukan dengan metode kompetitif	X 100% Jum'ah pengadaan yang dilakukan tama metode kompetitif	
3.		Rusio Lilai bulania sang dilakukan melalui pengadaan	Jumiah nikii belanja langsung yang melakii pengadaan X 19095 total belanja langsung	33%

c) kepegawaian (Bobot Urusan : 20%)

No	JKX Cutjud	IIG: Octobre	Rumans	Desbut
1.	001-000000 page 2000	Bendid kan Tinggi dan Menegah/Dasar (% (PNS		50%
2.		tidak termasuk guru dan temaga kesebatan) Rasio proposai Purapsional	Juniah pegawai dengan pendatikan SMA ke bawah Juniah pegawai PNS fungsional	33%
		(%) (FNS tidak temasuk guru dan tenaga	kliluar guru dan teraga kesebatan)	
		kesehatan)	X 100%	

No	IEX Gritpot	IKK Outsome	Rimins	Pobet
3.		Rasio Jahatan Fungslonal berserrifikat Kompetensi (%) (FNS tidak termasuk guru dan tenaga kesebata d	schunh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesenctor.) Jumlah pegawai Zungsimal yang memiliki sertifiast kompetensi X 100% seluruh jumlah pegawai Emgakatal (PNS tidak termasuk guru dan tenaga keselustan)	03%

dj. Manajemen Kensugan (Boliat Densan : 2098)

No	IK3 Cutput	IKK Outcome	Summs	Hobot
1.		Deviasi realisasi be'anja terhadap belanja total dalam APDD	Ni'al absolut deri Total belanja dalam markesi ————————————————————————————————————	25%
2.		Declast realisasi PAD terbadap anggaran PAD dalam APBU	Nilai absolut dari Teral PAD dalam malisasi ——————————————————————————————————	25%

No.	He's Cutput	IKK Ontrome	Rimina	Hobet.
3.		Manajemen Aset	Apakah ada daftar asset totap? (Ya/Tidak) Apakah ada maratal untuk menyusun daftar asset titap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum calan laparan anggaran? (Ya/Tidak)	29%
4,		Rasio anggaran sisa terbadap total belanja dalam APBO tahun sebelumaya		25%

e) Transporansi dan Partisipasi Publik (Bohot Urusan : 20%)

No	HCC Cutput	IEEE O'a tecence	Runtis	Pobot
1.		Intermasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayaran	The contract of the contract o	30%
2.			Jumiah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ————————————————————————————————————	50%







 Penghitungan Skor Kincija Penyeknggaraan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Peringkat.

Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capa an kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro Ilustrasi sebagai berikut:

$$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0.75 + [PKM] \times 0.25$$

Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan caerah kola.

3. Penetapan Status Kincija Penyelengganaan Pemerintahan Daerah Status kincija penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai brrikut:

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
ι	1.00 - 1.80	Sangat Rendalt
-2	1.81 – 2.60	Renda h
3	2.61 3.40	Sedang
4	3.41 - 4.20	Tlaggi
ડાં	121 5.00	Sangat Tinggi

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN